

**PEMBINGKAIAN BERITA RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUU) PORNOGRAFI
DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA**

Kusnarto

PEMBINGKAIAN BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PORNOGRAFI DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA

Hak Cipta © pada Penulis, hak penerbitan ada pada Penerbit UPN Press

Penulis : Kusnarto
Diset dengan : MS - Word Font Times New Roman 12 pt.
Halaman Isi : 86
Ukuran Buku : 16 x 23 cm
Cetakan I : 2009

Penerbit : UPN Press

ISBN : 978 - 979 - 3100 - 67 - 8

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul "Pembingkaian Berita Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi Di Harian Kompas Dan Republika". Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan menjadi lebih baik.

Dalam penyusunan buku ini, penyusun tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari semua pihak. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keberhasilan dalam penyusunan buku ini, baik secara moral maupun material.

Kami berharap buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Komunikasi. Kami juga menyadari jika buku ini jauh dari sempurna, sehingga kritik serta saran akan sangat membantu dan menjadi masukan yang berharga bagi Kami.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
BAB V KESIMPULAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAKSI

Dari tujuan dan sikap media dalam melihat suatu peristiwa, media cetak tidak lepas dari perspektif yang dibangun dalam membuat berita. Begitu pula dalam pemberitaan RUU Pornografi. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah pembingkai berita RUU Pornografi ". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembingkai berita RUU Pornografi di harian Kompas dan Republika.

Isu RUU Pornografi merupakan hal yang kontroversial di masyarakat. Pembahasan mengenai RUU ini memakan waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih dua tahun. RUU ini mulai menjadi kajian pemerintah sejak 2006, namun baru disahkan akhir Oktober 2008. Banyaknya kontroversi di masyarakat antara kelompok yang Pro dan Kontra membuat pemerintah harus lebih mempertimbangkan banyak hal terkait RUU tersebut, khususnya yang bersifat substansial. Karena yang dianggap porno disini, belum tentu porno ditempat lain.

Setiap wartawan harus obyektif dalam menyampaikan fakta atau realitas kepada masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri jika kinerja seorang wartawan sangat di pengaruhi oleh ideologi medianya. Kompas merupakan surat kabar harian nasional yang mempunyai ideologi Hak Asasi Manusia, sehingga dalam setiap pemberitaannya harian ini selalu melihat atau menilai isu dari sudut pandang kemanusiaan. Sedangkan Republika merupakan surat kabar harian nasional yang mempunyai ideologi Islam. Bahkan secara terang-terangan dia menyebut dirinya sebagai media Islam, sehingga harian ini selalu melihat atau menilai isu dari sudut pandang agama Islam.

Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Massa dan Konstruksi Realitas, Media dan Berita dilihat dari Pandangan Konstruktifis, Berita Sebagai Hasil Konstruksi Realitas, Wartawan Sebagai Agen Konstruksi Realitas, Ideologi Institusi Media, Analisis Framing termasuk Paradigma Konstruktifis, Analisis Framing dan Perangkat Framing Robert N. Entman.

Penelitian ini diteliti melalui analisis framing dan menggunakan perangkat framing Robert N. Entman yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kalimat dan kata yang dimuat dalam teks berita mengenai RUU Pornografi di surat kabar harian Kompas dan Republika. Sedangkan, korpus dalam penelitian ini berita RUU Pornografi pada harian Kompas edisi 14, 17, 27, 29 Oktober 2008, kemudian pada harian Republika edisi 21, 26, 27, 29 Oktober 2008.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa antara harian Kompas dan harian Republika mempunyai perspektif yang sama dalam mendefinisikan isu mengenai RUU Pornografi. Harian *Kompas* mendefinisikan isu RUU Pornografi sebagai masalah politik dan harian *Republika* juga mendefinisikan isu mengenai RUU Pornografi sebagai masalah politik. Tetapi dalam hal membuat keputusan moral dan menekankan penyelesaian, kedua harian ini berbeda.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berita yang beredar di tengah masyarakat mengenai akan disahkan sebuah rancangan undang-undang yang mengatur tentang pornografi (RUU Pornografi) oleh pemerintah merupakan suatu hal yang kontroversial. Hampir semua media nasional berlomba-lomba memberitakan RUU tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak dengan saling mempertahankan argumen masing-masing. Banyaknya demonstrasi yang digelar masyarakat dari kelompok pro dan kontra semakin mewarnai kontroversi RUU Pornografi.

Sebenarnya RUU Pornografi sudah mulai menjadi bahan kajian pemerintah sejak 2006 lalu. Pada saat itu gagasan awalnya adalah RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi). Gagasan ini muncul karena banyaknya masyarakat yang menilai menurunnya moral bangsa yang disebabkan pornografi dan pornoaksi. Hal ini dianggap sangat membahayakan generasi bangsa, sehingga harus ada aturan yang mengkatrol hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi.

Tapi seiring dengan besarnya gejolak yang ada di masyarakat, pemerintah harus mengkaji ulang RUU yang mengatur tentang pornografi, khususnya yang bersifat substansial. Sebagian masyarakat menganggap beberapa pasal yang ada pada RUU tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia, terkait dengan

kemajemukan masyarakat kita yang tentunya mempunyai budaya berbeda-beda.

Kontroversial yang berkepanjangan dari isu RUU Pornografi di tengah masyarakat membuat media saling bersaing dalam menyajikan berita yang aktual dan menarik pembaca. Oleh karena itu wacana yang ditimbulkan cenderung penuh sensasional dan kontradiktif. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana harian Kompas dan Republika dalam membingkai berita tentang RUU Pornografi. Terutama dalam hal menyusun, mengisahkan, menulis, dan menekankan fakta-fakta dari isu tersebut.

Berita yang muncul di media massa merupakan hasil saringan dan kebijakan redaksi atas suatu peristiwa yang diliput dan disesuaikan dengan sikap dan tujuan media. Berangkat dari tujuan dan sikap media dalam melihat suatu peristiwa, media tidak lepas dari perspektif yang telah dibangun dalam membuat dan menyajikan sebuah berita.

Perspektif media juga akan menentukan fakta yang akan dipilih dan ditonjolkan. Penonjolan proses membuat informasi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol memiliki potensi untuk diperhatikan dan dapat mempengaruhi pembaca dalam memahami sebuah realitas.

Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi. Informasi yang disajikan media massa merupakan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga antara manusia dan media massa

keduanya saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan media massa untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi, sedangkan media massa membutuhkan manusia untuk mendapatkan informasi dan mengkonsumsi berita-berita yang disajikan oleh media tersebut. Berita-berita yang disajikan oleh media massa merupakan hasil seleksi dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Selain itu berita yang disampaikan kepada khalayak juga harus mengandung nilai berita. Jadi, tidak semua kejadian di masyarakat ditampilkan oleh media massa. Media massa juga memiliki wewenang untuk menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Hal ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh masing-masing media. (Sobur, 2002 : 162)

Media massa mempunyai dua pengertian yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah mingguan, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan pers dalam arti luas meliputi media massa cetak dan elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik. (Effendy, 1993 : 90)

Kurniawan Junaedhi dalam Buku Ensiklopedi Pers Indonesia menyebutkan pengertian surat kabar sebagai sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa cetak, berupa lembaran-lembaran berisi berita, karangan-karangan dan iklan yang diterbitkan

secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan, serta diedarkan secara umum. (Junaedhi, 1991 : 257)

Seperti yang diketahui, bahwa media massa tidak hanya menyediakan informasi, tetapi dengan informasi itu, media bisa mempengaruhi. Media massa menjadi hal yang penting untuk menentukan suatu bangsa dalam waktu ke depan, karena media bukan sekedar institusi bisnis tempat orang mencari pekerjaan dan keuntungan, tetapi media massa juga merupakan institusi sosial sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat luas, yang prosesnya potensial mempengaruhi apa yang terjadi pada masyarakat di masa yang akan datang, baik dalam proses politik, kehidupan sosial, atau ekonomi.

Kehadiran media cetak ditengah masyarakat merupakan salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, masing-masing institusi media mencoba menghadirkan realitas kehidupan yang ada di sekitar masyarakat. Mereka berlomba menyajikan informasi yang aktual sesuai dengan segmentasi khalayak yang menjadi sasarannya, namun tidak terlepas dari visi dan misi industri media itu sendiri.

Dalam menyajikan berita yang akan disampaikan kepada khalayak, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh keredaksian yang dapat membatasi wartawan dalam menulis berita. Kebijakan redaksional menjadi sebuah pedoman serta ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang oleh surat kabar itu patut diangkat dan dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional

tersebut menjadi kerangka acuan serta kriteria dalam menyeleksi dan mengolah menjadi berita. (Oetama, 2001 : 146)

Berita merupakan laporan fakta dari suatu peristiwa, namun tidak semua berita aktual tersebut dapat menjadi sebuah berita. Redaksi akan menyeleksi terlebih dahulu laporan-laporan mengenai peristiwa aktual ke meja redaksi untuk kemudian dipilih laporan peristiwa yang dianggap menarik perhatian pembaca dan dirasa penting untuk diketahui oleh pembaca. Selain itu nilai berita yang tinggi menentukan akan disajikannya laporan peristiwa menjadi sebuah berita.

Berita pada dasarnya dibentuk melalui proses aktif dari pembuat berita. Peristiwa yang kompleks dan tidak beraturan, disederhanakan dan dibuat bermakna oleh pembuat berita. Tahap paling awal dari produksi sebuah berita adalah bagaimana wartawan mempersepsikan peristiwa atau fakta yang akan diliput.

Para Jurnalis selalu mengatakan bahwa dirinya telah bertindak secara objektif, seimbang, dan tidak berpihak kepada kepentingan apapun kecuali solidaritas atas hak khalayak untuk mengetahui kebenaran. Meskipun sikap independen dan objektivitas selalu dijadikan patokan bagi setiap jurnalis, namun pada kenyataannya masih sering dijumpai susunan berita yang berbeda atas suatu peristiwa. Ada media yang menonjolkan aspek tertentu, dipihak lain ada media yang menutupi aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dibalik jubah independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi, bahkan ironi. (Eriyanto, 2004 : iv)

Fakta yang akurat dan aktualisasi masyarakat, merupakan perwujudan dari sebuah informasi atau berita yang selaras, seimbang, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu setiap perspektif media dalam mengolah dan menyusun berita akan selalu berbeda-beda, baik dalam kemasa atau dalam tampilannya. Hal tersebut dikarenakan adanya segmentasi yang berbeda-beda serta visi dan misi yang dibangun dan diciptakan oleh masing-masing media.

Sikap netral yang seharusnya ditunjukkan oleh sebuah media massa, menjadi pudar karena adanya prasangka atau kepentingan tertentu. Setiap media (media cetak) menyajikan berita dengan perspektif tertentu serta berupaya menggiring pembacanya untuk menerima dan menjadikan perspektif itu sebagai satu-satunya kebenaran

Dengan membandingkan beberapa pemberitaan di media, sangat mungkin akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa tidak mungkin media apapun dan media manapun dapat lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial atau bahkan budaya.

Media bukanlah saluran yang bebas, media tidak selamanya sama persis dengan yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cerminan dari realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Media yang ada, justru mengkonstruksi sedemikian rupa terhadap realitas yang ada. Ini semua berkaitan dengan bagaimana cara pandang media dalam membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas tertentu.

Seperti halnya pada surat kabar harian Kompas dan Republika, kedua harian tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyeleksi suatu peristiwa/isu dan menulis berita mengenai RUU Pornografi yang akan disahkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang wartawan masing-masing media, antara harian Kompas dan Republika dalam mempersepsikan kasus tersebut yang kemudian membingkainya ke dalam bentuk susunan berita. Selain itu perbedaan cara pandang kedua harian tersebut dalam mengemas dan menyajikan berita dapat juga disebabkan adanya perbedaan suatu kebijakan redaksi serta perbedaan visi dan misi dari masing-masing media.

Pada surat kabar harian Kompas tanggal 29 Oktober 2008, dituliskan berita mengenai RUU Pornografi di halaman 15 dengan judul "PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi". Di edisi ini harian Kompas memberitakan tentang penolakan Fraksi PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi menjadi Undang-Undang. Mereka beralasan bahwa isi atau pasal dalam RUU Pornografi masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah pembuatan perundang-undangan.

"Hal ini melanggar kaidah pembuatan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nomor 10 tahun 2004".

Harian Kompas juga mengutip beberapa pendapat dari beberapa sumber terkait antara lain Juru Bicara Fraksi PDI-P, Wila Chandrawila Supriadi, Juru Bicara Fraksi PKB, Badriyah Fayumi, serta Juru Bicara Fraksi PAN, Azliani Agus. Beberapa sumber di atas

adalah anggota DPR yang mewakili setiap fraksi dari parpolnya dalam menggodok RUU Pornografi.

Dalam edisi ini Kompas lebih menonjolkan pandangan atau penilaian dari fraksi PDI-P mengenai RUU Pornografi. Hampir semua isi berita berisikan tentang alasan atau argumen fraksi PDI-P yang menolak menyetujui pengesahan RUU tersebut.

Seperti pada pasal 1 tentang definisi pornografi dan Pasal 10 tentang larangan pornografi. Menurut Juru Bicara PDI-P, Wila meskipun judul RUU tersebut adalah Pornografi, tetapi dalam Pasal 1 masih diatur tentang Pornoaksi, yaitu dengan masih adanya frase gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum.

Dia juga menambahkan Pasal lain, yakni Pasal yang mengatur tentang peran serta masyarakat dibuka lebar. Hal ini akan berdampak pada kesewenang-wenangan atau memunculkan polisi moral atau milisi-milisi yang keberadaannya tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Harian Kompas juga mengutip pendapat Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Badriyah Fayumi yang mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat dua, terkait dengan keputusan Bamus. Dia juga mengajak pemerintah mensosialisasikan RUU tersebut, terutama pada yang menolak. Selain itu, pada edisi ini harian Kompas juga mengutip pendapat Juru Bicara FPAN, Azliani Agus yang berpendapat bahwa PAN ingin ikut serta menyelamatkan bangsa dari keterpurukan akibat maraknya pornografi.

Berdasarkan realitas yang ada, surat kabar harian Kompas lebih menekankan isu mengenai penolakan fraksi PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi dengan beberapa alasan atau argumen yang bersifat substansial. Hal ini terkesan adanya konflik politik di DPR terkait pengesahan RUU Pornografi. Bahkan dari pemberitaan ini Kompas seakan-akan hanya menyampaikan pandangan dari fraksi PDI-P tentang RUU tersebut.

Sedangkan pada surat kabar harian Republika edisi tanggal 29 Oktober 2008, pada berita utama halaman dengan headline "RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna". Di edisi ini harian Republika memberitakan tentang kesepakatan beberapa fraksi di DPR yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, walaupun ada dua fraksi yang tidak setuju. Kedua fraksi tersebut adalah fraksi PDI-P dan fraksi PDS.

Tidak jauh berbeda dengan harian Kompas, Harian Republika mengutip pendapat dari beberapa sumber terkait yang berasal dari partai politik di DPR terkait dengan pengesahan RUU Pornografi. Antara lain anggota Fraksi Partai Golkar, Irsyad Sudiro, yang mengatakan dalam pandangan mininya, Partai Golkar menilai RUU Pornografi sudah sangat memenuhi syarat untuk diselesaikan.

"Kami tak melihat adanya kekurangan mendasar RUU ini. Substansinya sudah menampung semua pihak".

Irsyad Sudiro menambahkan bahwa pengesahan RUU Pornografi akan berlangsung Kamis, 30 Oktober. Dalam paripurna itu tidak akan terjadi voting, karena FPDI-P dan FPDS tegas menolak seluruh materi RUU.

”Karena mereka menolak keseluruhan jadi mereka tidak dihitung dalam dalam pengesahan itu”.

Di edisi ini juga dikutip pendapat Juru Bicara Fraksi PAN, Azliani Agus dan Juru Bicara Fraksi PKB Badriyah Fayumi yang keduanya pro RUU Pornografi.

Berdasarkan realitas yang ada, surat kabar harian Republika lebih menekankan isu mengenai kesepakatan mayoritas fraksi yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan diwarnai dengan penolakan FPDI-P dan FPDS terhadap disahkannya RUU ini. Berbeda dengan harian Kompas, harian Republika dalam pemberitaannya mengenai pengesahan RUU Pornografi lebih banyak menonjolkan pandangan dari fraksi parpol yang mendukung RUU ini untuk disahkan.

Dengan melihat berita dari kedua surat kabar harian diatas, yakni surat kabar harian Kompas dan surat kabar harian Republika, terdapat perbedaan antara masing-masing media tersebut dalam hal membingkai (*frame*) dan memberitakan isu yang sama. Isu tersebut mengenai pengesahan RUU Pornografi. Contoh yang paling mendasar terletak pada bagaimana kedua media di atas dalam memberikan judul berita. Dalam surat kabar harian Kompas dengan judul ”PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi ”, sedangkan pada surat kabar harian Republika dengan judul ”RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna”. Namun terdapat kesamaan dari kedua harian tersebut dalam pengambilan sumber berita, yakni keduanya

menyajikan sumber berita dari perwakilan fraksi parpol di DPR. Tapi, harian Kompas lebih menonjolkan sumber berita dari fraksi parpol yang kontra RUU Pornografi, sedangkan harian Republika lebih menonjolkan sumber berita dari fraksi parpol yang pro RUU.

Dari realitas ini, sebenarnya kedua harian antara Kompas dan Republika lebih menonjolkan tentang konflik politik yang terjadi di DPR terkait pengesahan RUU Pornografi. Keduanya saling berlomba seakan-akan argumen dari parpol yang dijadikan sumber berita yang paling benar. Perspektif ini yang mereka tonjolkan untuk mempengaruhi khalayak sebagai pembaca.

Berangkat dari tujuan dan sikap media dalam melihat suatu peristiwa, media tidak lepas dari perspektif yang dibangun dalam membuat berita. Begitu pula dalam pemberitaan tentang RUU Pornografi, yaitu bagaimana media memaknai berita tersebut dalam pemberitaannya pada surat kabar harian Kompas dan Republika.

Surat kabar harian Kompas merupakan representasi dari suara Katholik. (Sudibyo, 2001 : 8). Kompas juga memiliki kerajaan bisnis yang terdiri dari 38 perusahaan, yang dikenal sebagai Kompas Gramedia Group. Melalui berbagai buku, majalah, surat kabar, Kompas Gramedia Group mendominasi industri penerbitan. (Send dan Hill, 2001 : 68-69). Harian Kompas memiliki visi manusia dan kemanusiaan, sehingga harian ini berusaha untuk senantiasa peka akan nasib manusia dan berpegang pada ungkapan klasik dalam jurnalistik, yaitu menghibur yang papan dan mengingatkan yang mapan. (Oetama, 2001 : 147). Selain itu peneliti tertarik untuk memilih surat kabar harian Kompas sebagai salah satu media yang

diteliti, karena dalam pemberitaan RUU Pornografi lebih menekankan isu mengenai pro-kontra dan substansi dari RUU itu sendiri.

Selain surat kabar harian Kompas, surat kabar harian Republika juga dipilih penulis dalam penelitian ini. Surat kabar harian Republika merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berubah. (<http://www.republika.co.id/default.asp>) diakses tanggal 28 Oktober 2008. Surat kabar yang terbit perdana pada 4 Januari 1993 ini, mengesankan membawa aspirasi mayoritas jurnalis serta intelektual Islam yang liberal dan sekuler dalam mengangkat isu maupun peristiwa. Tapi secara ideologis menginformasikan nilai-nilai Islam dan secara terbuka menyatakan sebagai media Islam. (Fathurozy, 2005 : 8)

Sejak awal berdirinya Republika memang mendapat tempat dan dukungan penuh dari penguasa orde baru, yaitu Presiden Soeharto. Hal ini dikarenakan Republika selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan islam dalam pemberitaanya dari pada menyoroti atau bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam bidang politik) pada saat itu. Pengertiannya surat kabar yang mempunyai slogan "Akrab dan

Cerdas” ini dalam pemberitaannya cenderung memihak dalam satu sisi, yaitu umat Islam. Sehingga banyak dari pejabat Pemerintah duduk sebagai pimpinan ICMI, dan memunculkan sikap sinisme bahwa ICMI merupakan organisasi yang dimanfaatkan pemerintah dalam mencari dukungan pada umat Islam. (Rusikawati, 2004 : 12). Selain itu, penulis tertarik memilih surat kabar harian Republika sebagai media yang diteliti, karena dalam pemberitaannya lebih menekankan pada kepastian akan disahkannya RUU Pornografi yang dianggap lamban. Menurut Harian Republika RUU itu penting demi masa depan generasi muda yang merupakan harapan bangsa, karena berhubungan dengan moral bangsa.

Baik surat kabar harian Kompas dan republika, keduanya telah menunjukkan kapasitas sebagai surat kabar berskala nasional dengan segmentasi pembaca yang jelas (kritis dan agamis).

Prinsip analisis framing menyatakan bahwa terjadi proses seleksi terhadap dimensi-dimensi tertentu dari fakta yang diberikan oleh media. Fakta ditampilkan apa adanya, namun diberi bingkai (*frame*) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik. Dalam hal ini biasanya media menyeleksi sumber berita, memanipulasi pernyataannya dan mengedepankan perspektif tertentu, sehingga suatu interpretasi menjadi lebih mencolok (*noticeable*) dari pada interpretasi yang lain. (Entman, 1993 : 32-53)

Untuk melihat perbedaan media dalam mengungkap suatu peristiwa (realitas), peneliti memilih analisis *framing* sebagai metode penelitiannya. Alasannya adalah karena dalam perspektif Komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara

atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisi ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik dan lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya akan menentukan apa yang akan diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan yang akan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut. (Nugroho, Eriyanto, Surdaryasis, dalam Sobur, 2006 : 162)

Selain itu analisis *framing* juga merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaihan realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang dilakukan oleh media. Pembingkaihan tersebut merupakan konstruksi yang artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan makna dan cara tertentu. *Framing* digunakan untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. (Krisyantono, 2006 : 252)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Robert N. Entman. Secara teknis *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain serta menonjolkan aspek tersebut dengan menggunakan beragam strategi dan wacana. Strategi dan wacana adalah upaya menyuguhkan berita tentang pandangan tertentu agar lebih diterima, ini sesuai dengan

konsep yang dikemukakan oleh Robert N. Entman. (Sobur, 2002 : 199-200)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :”Bagaimanakah surat kabar harian Kompas dan Republika dalam membingkai berita tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah ”Untuk mengetahui pembingkai berita Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di harian Kompas dan Republika”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan ciri ilmiah pada sebuah penelitian dengan mengaplikasikan teori Komunikasi, tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi referensi kepada mahasiswa Komunikasi yang tertarik pada penelitian *framing*, khususnya dengan model Robert N. Entman.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Media Massa dan Konstruksi Realitas

Istilah interaksi merujuk pada bagaimana gagasan dan pendapat tertentu dari seseorang atau sekelompok orang ditampilkan dalam pemberitaan. (Eriyanto, 2001 : 113), sehingga realitas yang terjadi tidak digambarkan sebagaimana mestinya, tetapi digambarkan secara lain. Bisa lebih baik atau bahkan lebih buruk, cenderung memarjinkan seseorang atau sekelompok orang tertentu.

Hal ini terkait dengan visi, misi, serta ideologi yang dipakai oleh masing-masing media, sehingga kadangkala dari hasil pembingkaiannya tersebut dapat diketahui bahwa media lebih berpihak pada siapa (jika yang diberitakan adalah seseorang, kelompok atau golongan dalam masyarakat, dalam banyak hal tergantung pada etika, moral dan nilai-nilai tertentu), tidak mungkin dihilangkan dalam pemberitaan. Hal ini merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi suatu realitas. Media menjadi tempat pertarungan ideologi antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Media dalam memaknai realitas melakukan dua proses. Pertama, pemilihan fakta berdasarkan pada asumsi bahwa jurnalis tidak mungkin tidak memandang secara perspektif. Kedua, bagaimana suatu fakta terpilih tersebut disajikan kepada khalayak.

Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan bagaimana fakta dapat diinterpretasikan dan dipahami oleh media. (Eriyanto, 2001 : 116)

Pendapat Sobur dalam bukunya “Analisis Teks Media”, bahwa hakekatnya pekerjaan media adalah mengkonstruksi realitas (Sobur, 2002 : 88). Isi media merupakan hasil para pekerja media dalam mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya untuk dijadikan sebuah berita, diantaranya realitas politik dan human interest. Disebabkan sifatnya dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang dikonstruksi (*construct reality*). Pembuatan berita di media pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas, sehingga membentuk sebuah “cerita”. Berita adalah realitas yang dikonstruksikan. (Tuchman dalam Sobur, 2002 : 88)

Gambaran tentang realitas yang “dibentuk” oleh isi media inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial. Informasi yang salah dari media massa, akan memunculkan sikap yang salah juga terhadap objek sosial itu. Karenanya media massa dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi ini yang merupakan tuntutan etnis dan moral penyajian isi media. Menurut istilah Peter Berger, isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayak. Sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. (Jurnal ISKI, 2001 : 11)

Media massa mempunyai peranan sebagai agen sosialisasi pesan tentang norma dan nilai. Surat kabar dan tabloid merupakan

salah satu bentuk media massa yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum. Sebagai seorang agen, wartawan telah menjalin transaksi dan hubungan dengan obyek yang diliputnya, sehingga berita merupakan produk dari transaksi antara wartawan dengan fakta yang dia liput. (Eriyanto, 2002 : 31)

Media cetak merupakan salah satu arena sosial, tempat berbagai kelompok sosial masing-masing dengan politik bahasa yang mereka kembangkan sendiri berusaha menampilkan definisi situasi atau realitas berdasarkan versi mereka yang dianggap sah. (Hidayat dalam Siahaan, 2001 : 88). Berita untuk media massa cetak surat kabar harus berfungsi mengarahkan, menumbuhkan atau membangkitkan semangat, dan memberikan penerangan. Artinya, berita yang kita buat harus mampu mengarahkan perhatian pembaca, sehingga mengikuti alur pemikiran yang tertulis dalam berita tersebut. (Djuroto, 2002 : 49)

Apa yang tersaji dalam berita yang kita baca setiap hari, adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

2.1.2 Media dan Berita dilihat dari Paradigma Konstruktifis

Pendekatan Konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. (Eriyanto, 2002 : 19)

1. Fakta / Peristiwa adalah hasil konstruksi

Bagi kaum Konstruksionis realitas ini subjektif. Realitas itu hadir karena dikonstruksi oleh konsep subjektif

wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsep realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.

2. Media adalah agen konstruksi

Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan dengan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan kaum positivis, media dilihat sebagai saluran, yakni bagaimana pesan disebarkan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis media bukanlah sekedar saluran yang bebas, media juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. Disini berarti media dipandang sebagai agen konstruksi social yang mendefinisikan realitas, jadi berita yang ada bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat nara sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

3. Berita bukanlah refleksi dari realitas, berita hanya konstruksi dari realitas

Dalam pandangan positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas, berita adalah *mirror of reality*, karena itu berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput (mencerminkan realitas yang hendak diteliti). Pandangan ditolak oleh kaum konstruksionis.

Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi social dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta ini di dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda.

4. **Wartawan bukan pelapor, Ia adalah agen konstruksi realitas**

Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektif pelaku social. Dalam pandangan paradigma konstruksionis dalam memindahkan realitas ke dalam sebuah berita, wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakan, karena wartawan merupakan bagian yang instrinsik dalam pembentukan berita. Berita juga bukan hanya produk individual, melainkan juga bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Dalam menuliskan berita, wartawan sebetulnya membuat dan membentuk dunia, membentuk realitas.

5. **Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas**

Hasil kerja Jurnalistik tidak dapat dinilai dengan menggunakan standart nilai yang rigid, hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda

dengan orang lain yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Karenanya, ukuran baku dan standart untuk bisa dipakai. Berita bersifat subjektif, artinya opini tidak dapat dihilangkan karena keyika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.

2.1.3 Berita sebagai hasil konstruksi realitas

Berita dalam pandangan Fishman, bukanlah refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada diluar sana. Berita adalah apa yang pemberita buat, jika berita merefleksikan sesuatu maka refleksi itu adalah praktek pekerja dalam organisasi yang memproduksi berita. Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Berita adalah produksi dari institusi sosial dan melekat dalam hubungannya dengan institusi lainnya. Berita adalah produk dari profesionalisme yang menentukan bagaimana peristiwa setiap hari dibentuk dan dikonstruksi.

Dalam pandangan Tuchman, berita adalah hasil transaksi antara wartawan dengan sumber, realitas yang terbentuk dalam pemberitaan bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata, melainkan relasi antara wartawan dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya. Berita tidak mungkin merupakan cerminan dan refleksi dari realitas, karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media.

Jadi berita yang kita baca setiap hari pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah buku jurnalistik. Berita bukanlah representasi dari realitas melainkan konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan seseorang atas sebuah realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya akan menghasilkan realitas yang berbeda pula. (Eriyanto, 2002 : 21)

2.1.4 Wartawan sebagai Agen Konstruksi Realitas

Wartawan adalah profesi yang dituntut untuk mengungkap kebenaran dan menginformasikan ke publik seluas mungkin tentang temuan dari fakta-fakta yang berhasil digalinya, apa adanya, tanpa rekayasa, dan tanpa tujuan subjektif tertentu, semata-mata dari pembangunan kehidupan dan peradaban manusia yang lebih baik. (Djatmika, 2004 : 25). Sedangkan Walter Lipman, menganggap bahwa kerja jurnalistik (tugas wartawan) hanyalah mengumpulkan fakta yang tampak dipermukaan, yang konkret. (Panuju, 2005 : 27)

Sebagai seorang agen, wartawan telah menjalin transaksi dan hubungan dengan objek yang diliputnya, sehingga merupakan produk dari transaksi antara wartawan dengan fakta yang diliputnya. (Eriyanto : 2002 :31). Menurut filsafat *Common Sense Realism*, adanya suatu objek tidak tergantung pada diri kita dan menempati posisi tertentu dalam ruang. Suatu objek mencirikan sebagaimana orang mempersepsikannya. Sesungguhnya, relasi atau realitas empiris dengan fakta yang dibangun oleh seorang jurnalis, sangat tergantung pada kemampuan mengorganisasikan elemen-elemen realitas menjadi sederetan makna. Dengan demikian, fakta dalam

jurnalists menjadi sangat dinamis, tergantung pada persepsi yang dimiliki dan perspektif yang dihadirkan, dan satu lagi tergantung pada pencarian atau penemuan fakta. (Panuju : 2005 : 27)

Setelah proses penyeleksian tersebut, maka peristiwa itu akan dibingkai sedemikian rupa oleh wartawan. Pembingkai akan dilakukan oleh wartawan tentunya melalui proses konstruksi. Proses konstruksi atas suatu realitas ini dapat berupa penonjolan dan penekanan pada aspek tertentu dan dapat juga berita tersebut ada bagian yang dihilangkan, luput atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan. (Eriyanto, 2002 : iv). Kata penonjolan (*salience*) didefinisikan sebagai alat untuk membuat informasi agar lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan. (Siahaan, Purnomo, Imawan, Jacky, 2001 : 78)

Wartawan sebagai individual, memiliki cara berpikir (*frame of thinking*) yang khas atau spesifik dan sangat dipengaruhi oleh acuan yang dipakai dan pengalaman yang dimiliki. Selain itu juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan menggunakan sudut pandang. Setiap individual juga memiliki konteks dalam “membingkai” sesuatu sehingga menghasilkan makna yang unik. Konteks yang dimaksud, misalnya senang atau tidak senang, menganggap bagian tertentu lebih penting dari pada bagian lain, dapat juga konteks sesuai bidang (sosial, politik, ekonomi, keamanan, agama, dll), juga konteks masa lalu dan masa depan, dan seterusnya. (Panuju, 2005 : 3)

Jadi meskipun wartawan mempunyai ukuran tentang “nilai sebuah berita” (*news value*), tetapi wartawan juga memiliki keterbatasan visi, kepentingan ideologis, sudut pandang berbeda,

bahkan latar belakang budaya dan etnis. Peristiwa itu baru disebut mempunyai nilai berita, dan karenanya layak diteliti kalau peristiwa tersebut berhubungan dengan elite atau orang yang terkenal, mempunyai nilai dramatis, terdapat unsur humor, *human interest*, dapat memancing kesedihan, keharuan dan sebagainya. Secara sederhana, semakin besar peristiwa, maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkannya, lebih memungkinkan dihitung sebagai berita. (Eriyanto, 2005 : 104)

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi, maka meningkat pula tingkat harga berita. Hipotesis inilah yang melahirkan paradigma 5W + 1H (*what, who, when, where, why, how*); bahwa berita tidak sekedar apa, siapa, kapan, melainkan juga mengapa dan bagaimana. “mengapa” adalah latar belakang dari suatu peristiwa, sedangkan “bagaimana” adalah deskripsi tentang jalannya peristiwa. Jadi semakin mendalam penjelasan tentang atas *why* dan *how*, maka semakin tinggi nilai berita, dan tentu saja semakin mahal harga berita tersebut. (Pareno, 2005 : 3)

Oleh karena itu, untuk mengetahui mengapa suatu berita cenderung seperti itu, atau mengapa peristiwa tertentu dimaknai dan dipahami dalam pengertian tertentu, dibutuhkan analisis kognisi sosial untuk menemukan struktur mental wartawan ketika memaknai suatu peristiwa. Menurut Van Dijk, analisis kognisi sosial yang memusatkan pada struktur mental, proses produksi berita. Analisis kognisi sosial menekankan bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan dan ditafsirkan, dan ditampilkan dalam suatu model dalam memori.

Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial adalah pengetahuan bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti : konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi. Menurut Berger dan Luckman, konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Realitas yang dimaksud Berger dan Luckman ini terdiri dari realitas objektif, realitas simbolik, dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada diluar diri individual, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolik merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik kedalam individual melalui proses internalisasi. (Bungin, 2001 : 13)

Wartawan menggunakan model atau skema pemahaman atas suatu peristiwa. Pertama, model ini menentukan bagaimana peristiwa tersebut dilihat. Model ini dalam taraf tertentu menggambarkan posisi wartawan. Wartawan yang berada dalam posisi mahasiswa mempunyai pemahaman dan pandangan yang berbeda dengan wartawan yang telah mempunyai pengalaman. Kedua, model ini secara spesifik mempunyai menunjukkan opini personal dan emosi yang dibawa tentang mahasiswa, polisi, atau objek lain. Hasil dari penafsiran dan persepsi ini, kemudian dipakai oleh wartawan ketika melihat suatu peristiwa. Tentu saja wartawan berbeda dalam hal

fokus, titik perhatian, dan kemenarikan dibandingkan dengan wartawan lain yang ditentukan diantaranya untuk perbedaan model yang dimilikinya. Disinilah model adalah prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memproduksi berita. (Eriyanto, 2002 : 268)

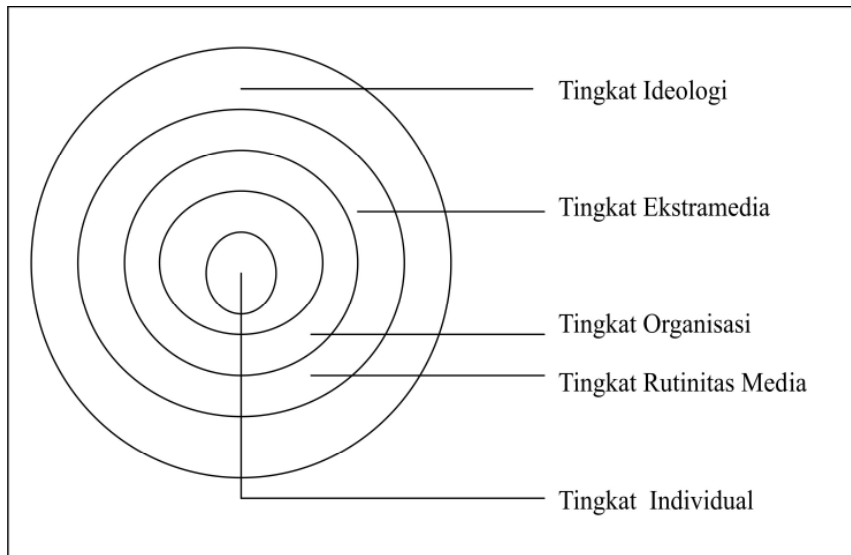
2.2 Ideologi Pada Media Massa

Pekerjaan media sebagai agen konstruksi realitas berlatar belakang pada ideologi yang dimiliki masing-masing media. Bagaimana sebuah peristiwa dibingkai bukan semata-mata disebabkan struktur skema wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa. Wartawan hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan, pola kerja, dan aktivitas masing-masing, bisa terjadi institusi media itu yang mengontrol dalam pola kerja tertentu yang mengharuskan wartawan melihat peristiwa dalam kemasan tertentu, atau bisa juga terjadi wartawan sebagai bagian dari anggota komunitas menyerap nilai-nilai yang ada dalam komunitasnya. (Eriyanto, 2007: 99). Nilai-nilai tersebut dianut oleh media sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam setiap pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak.

Karl Mark (1818-1883) dan Fredich Engels (1820-1895) melihat ideologi sebagai fabrikasi atau pemalsuan yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk membenarkan diri mereka sendiri. Karena itu, konsep ideologi tersebut jelas sangat subjektif dan keberadaannya hanya untuk melegitimasi kelas penguasa ditengah

masyarakat. (Sobur, 2006 : 64). Berdasarkan teori tersebut, media dipandang sebagai dominasi dari para penguasa yang memiliki kepentingan tertentu.

Sedangkan Shoemaker dan Reese menyebutkan objektivitas lebih merupakan ideologi bagi jurnalis dibandingkan seperangkat aturan atau praktik yang disediakan oleh jurnalis. Ideologi ini adalah konstruksi untuk memberi kesadaran kepada khalayak bahwa pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Di dalam suatu pemberitaan, pembaca kerap berharap media bertindak netral dan seimbang ketika memberitakan pihak-pihak yang berkonflik. Kecenderungan atau perbedaan setiap media dalam memproduksi informasi kepada khalayak dapat diketahui dari pelapisan-pelapisan yang melingkupi institusi media. Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese membuat model "*Hierarchy of Influence*" yang menjelaskan hal ini:



1. Pengaruh individu pekerja-pekerja media. Diantaranya adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang personal, dan profesional.
2. Pengaruh rutinitas media. Apa yang dihasilkan oleh media massa dipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh komunikator termasuk tenggat waktu (*deadline*) dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan tempat(*space*), kepercayaan reporter pada sumber-sumber resmi dalam berita yang dihasilkan.
3. pengaruh organisasional. Salah satu tujuan yang penting dari media adalah mencari keuntungan materiil. Tujuan-tujuan dari media akan berpengaruh pada isi yang dihasilkan.
4. pengaruh dari luar organisasi. Pengaruh ini meliputi lobi dari kelompok kepentingan terhadap isi media. Pseudoevent dari praktisi publik relation dan pemerintah yang membuat peraturan-peraturan di bidang pers.
5. pengaruh ideologi. Ideologi merupakan sebuah pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh. Ideologi disini diartikan sebagai mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang mempersatukan di dalam masyarakat. (Sobur, 2006 : 138-139)

2.3 Analisis Framing termasuk Paradigma Konstruktifis

Analisi *framing* termasuk ke dalam paradigma konstruktifis. Dimana paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Paradigma ini juga

memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Sehingga konsentrasi analisisnya adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa dikonstruksi atau dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma ini sering disebut sebagai paradigma produksi dan penukaran makna. (Eriyanto : 2002 : 37)

Konsep *framing* daripada konstruksionis dalam literatur sosiologi, memperkuat asumsi mengenai proses kognitif individual-penstrukturan kognitif dan teori proses pengendalian informasi-dalam psikologi. *Framing* dalam konsep psikologi dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu yang lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu atau penarikan kesimpulan. (Siahaan, Purnomo, Imawan, Jacky, 2001 : 77)

Yang menjadi titik perhatian dalam paradigma konstruktifis adalah bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi, saling memproduksi dan mempertukarkan makna. Pesan dibentuk secara bersama-sama antara pengirim dan penerima atau pihak yang berkomunikasi dan dihubungkan dengan konteks sosial dimana mereka berada. Intinya adalah bagaimana pesan itu dibuat atau diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan itu secara aktif, ditafsirkan oleh individu sebagai penerima pesan. (Eriyanto, 2002 : 40)

2.4 Analisis Framing

Analisis *framing* merupakan suatu analisis yang dipakai untuk mengungkapkan bagaimana seorang wartawan dari semua media tertentu membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas atas kasus tertentu. Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik. Lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Selain itu analisis *framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah bagian tertentu dari realitas yang menonjol dan lebih mudah dikenal. (Eriyanto, 2002 : 66)

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan kategori standar untuk mengapresiasi realita. Lalu dikembangkan lagi Goffman pada tahun 1974, mengandaikan *frame* sebagai kepentingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas. (Sobur, 2002 : 162)

Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh para wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang

diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. (Nugroho et al, dalam Sobur, 2006 : 162). Karenanya bertia menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai suatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar, atau tidak terelakkan. (Imawan dalam Sobur, 2006 :162)

Pendekatan *framing* ini merupakan metodologi yang dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi berita, dengan kata lain *framing* adalah pendekatan yang digunakan oleh wartawan untuk mengetahui bagaimana ketika menyeleksi isu. (Sobur, 2002 : 162). Asumsi dasar dari *framing* adalah pengalaman sosial dan kecenderungan psikologis ketika menafsirkan pesan yang datang kepadanya. Individu tidak dibayangkan sebagai subjek yang pasif akan tetapi dipandang aktif dan otonom. (Sobur, 2002 : 165)

Robert N. Entman lebih lanjut mendefinisikan *framing* sebagai suatu proses seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol bila dibandingkan dengan aspek lain dalam suatu teks komunikasi, serta menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lain. (Eriyanto, 2002 : 185)

Dari definisi Entman tersebut *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan

penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas atau isu tersebut. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. (Eriyanto, 2002 : 187)

Dalam prakteknya, *framing* dijalankan oleh media dalam menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline*, depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat definisi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2002 : 186)

Entman menyebutkan *framing* sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itulah yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto, 2002 : 187)

2.5 Perangkat Framing

Robert N. Entman mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih

menonjol dalam teks komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap suatu masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.

Entman membagi teknik *framing* menjadi empat bagian utama, yaitu :

1. Identifikasi Masalah (*Problem Identification*)

Yaitu bagaimana suatu peristiwa atau isu itu dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Elemen ini adalah master frame atau bingkai yang paling utama, karena berhubungan dengan bagaimana peristiwanya dipahami secara berbeda, dengan nilai positif atau negatif. Dari bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula.

2. Identifikasi Penyebab Masalah (*Causal Interpretation*)

Yaitu siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa dan siapa. Bagaimana peristiwa tersebut dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai nara sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami berbeda pula.

3. Evaluasi Moral (*Moral Evaluation*)

Yaitu penilaian terhadap penyebab masalah. Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan.

Elemen ini dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi kepada pendefinisian masalah yang sudah ditentukan. Maka ketika masalah sudah didefinisikan dan penyebab masalahnya sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu familiar dan dikenal oleh masyarakat.

4. Saran Penanggulangan Masalah (*Treatment Recommendation*)

Yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2002 : 188-191)

Tabel 1. Kerangka Framing

Robert N. Entman

Define Problem (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu itu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose Causes (Merperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegasikan suatu tindakan?
Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknis analisis *Framing*. Analisis ini mencoba melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, bagaimana realitas atau peristiwa itu dikonstruksi oleh media, bagaimana media membingkai peristiwa tertentu.

Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana cara media membingkai atau mengkonstruksi berita-berita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di surat kabar harian Kompas dan harian Republika yang meliputi penyeleksian isu dan penulisan berita. Penulisan berita ini terdiri dari bagaimana cara wartawan dalam menyusun fakta dan menekankan fakta.

Dengan menekankan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis kalimat demi kalimat, kata demi kata yang ada dalam pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi pada surat kabar harian Kompas dan Republika.

3.1.1 Definisi Operasional

”Pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi”

Yang dimaksud dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi adalah suatu rencana undang-undang atau peraturan yang

di rancang oleh pemerintah untuk mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi.

Sedangkan yang dimaksud dengan berita-berita di surat kabar harian Kompas dan Republika adalah suatu peristiwa atau kejadian yang ditulis sedemikian rupa oleh wartawan dari kedua harian tersebut untuk yang kemudian dimuat dan disajikan kepada khalayak. Dalam penelitian ini adalah mengenai berita yang dimuat oleh surat kabar harian Kompas dan Republika tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi.

Jadi, pemberitaan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi adalah berita-berita yang dimuat oleh surat kabar harian Kompas dan Republika mengenai undang-undang yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Rancangan undang-undang ini mengalami perdebatan panas dikalangan elite dan pro-kontra yang berkepanjangan dikalangan masyarakat umum. Pembingkaiian mengenai Rancangan Undang-Undang (aruu) Pornografi di surat kabar harian Kompas dan republika ini akan dianalisis berdasarkan perangkat *framing* model Robert N. Entman.

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Yang merupakan subyek dari penelitian ini adalah Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Republika. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah berita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi selama bulan November 2008, tepatnya 14 November sampai dengan 29 November 2008.

3.3 Unit Analisis

Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah unit analisis *reference*, yaitu unit yang digunakan untuk menganalisis kalimat atau kata yang dimuat dalam teks berita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi pada surat kabar harian Kompas dan Republika.

Analisis teks media dengan melihat hubungan antar kalimat, penulisan nara sumber, penulisan latar, penggunaan gaya bahasa, untuk mengungkapkan pemaknaan pada perspektif yang digunakan oleh media cetak, yakni harian Kompas dan Republika dalam melihat suatu peristiwa, yang dalam hal ini berita tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi.

3.4 Populasi dan Korpus

Populasi dalam penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat di surat kabar harian Kompas dan harian Republika pada bulan Oktober 2008.

Sedangkan Korpusnya adalah suatu himpunan terbatas atau terbatas dari unsur yang memiliki sifat bersama atau tunduk pada aturan yang sama. (Arkoun dalam Achmad, 2001 : 43). Pendapat lain juga ada yang mengatakan korpus adalah sekumpulan bahan yang terbatas, yang ditentukan pada perkembangan oleh analisis dengan semacam kesemenaan, bersifat sehomogen mungkin. (Kurniawan, 2001 : 70). Sifat yang homogen itu diperlukan untuk memberi harapan yang beralasan bahwa unsu-unsurnya dapat dianalisis secara keseluruhan.

Adapun korpus dalam penelitian ini adalah berita-berita yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dalam surat kabar harian Kompas 14, 17, 27, dan 29 Oktober 2008. sedangkan dalam surat kabar harian Republika 21, 26, 27, dan 29 Oktober 2008.

Korpus yang terdapat pada surat kabar harian Kompas adalah sebagai berikut :

1. Berita 14 Oktober 2008, “Pengesahan Dikhawatirkan Ganggu Keutuhan NKRI”.
2. Berita 17 Oktober 2008, “Bamus Minta RUU Pornografi Didalami Lagi”.
3. Berita 27 Oktober 2008, “Dipaksa Selesai Pembahasannya”.
4. Berita 29 Oktober 2008, “PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi”.

Sedangkan, korpus yang terdapat dalam surat kabar harian Republika sebagai berikut :

1. Berita 21 Oktober 2008, “Definisi Pornografi Mengarah Ke Voting”.
2. Berita 26 Oktober 2008, “RUU Pornografi Tak Berangus Budaya”.
3. Berita 27 Oktober 2008, “Tak Ada Alasan Menunda Pengesahan RUU Pornografi”.
4. Berita 29 Oktober 2008, “RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna”.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan secara langsung dari medianya dengan mengidentifikasi wacana berita yang berpedoman pada model analisis *framing* dari Robert N. Entman. Data hasil identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis guna mengetahui bagaimana kedua harian surat kabar, antara harian Kompas dan Republika mengemas atau mengkonstruksi suatu fakta, yaitu tentang RUU Pornografi ke dalam berita.

Sedangkan data-data pada penelitian ini adalah berita-berita mengenai RUU Pornografi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari informasi-informasi yang relevan dari buku, internet yang digunakan untuk menambah perspektif kajian analisis peneliti dalam upaya menjawab permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan institusi sosial, dalam hal ini Media (khususnya Wartawan sebagai anggota atau bagian dari institusi ,media), ketika melakukan praktek penyeleksian isu dan menulis berita. Fakta mana yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, serta hendak dibawa ke arah mana berita tersebut. Karenanya berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai suatu *legitimate*, objektif, alamiah, wajar atau tidak terelakkan. (Sobur, 2002 : 162)

Metode analisis *framing* yang dipakai pada penelitian ini adalah model *framing* Robert N. Entman, yaitu melihat bagaimana cara suatu media bercerita (*story line*) yang berkesinambungan saat mengkonstruksi dan memaknai suatu isu, yang digambarkan oleh media sebagai *frame* dari sebuah ide atau gagasan utama (*core frame*).

Berita-berita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang dimuat oleh surat kabar harian Kompas dan Republika pada periode 14 sampai dengan 29 Oktober 2008 sebagai gagasan utama, kemudian dianalisis berdasarkan perangkat *framing* dari Robert N. Entman, dengan melalui langkah-langkah analisis *framing*.

3.7 Langkah-langkah Analisis Framing

Dengan menggunakan perangkat *framing* pada model Robert N. Entman, peneliti hendak menguraikan langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini. Berita-berita dalam surat kabar harian Kompas dan Republika yang memuat berita Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi ini akan dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah dari perangkat *framing* Robert N. Entman, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, menentukan frame dari gagasan utama (*core frame*), isu yang diajukan sebagai sentral penelitian, yaitu berita yang memaparkan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dari masing-masing media yang diteliti, yaitu surat kabar harian Kompas dan Republika.

Kedua, yaitu dengan melihat simbol-simbol yang ditampilkan oleh kedua media, mengenai ide sentral yang terbentuk. Yang kemudian simbol-simbol tersebut diidentifikasi menggunakan perangkat *framing* dari Robert N. Entman (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, evaluasi moral dan saran penanggulangan masalah).

1. Mengidentifikasi masalah, pada tahap ini berkaitan dengan bagaimana harian Kompas dan Republika mengidentifikasikan atau melihat sebagai apa atau sebagai masalah apa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi. Elemen ini adalah bingkai yang paling utama, karena berhubungan dengan bagaimana RUU Pornografi dipahami secara berbeda, dengan nilai positif atau negatif oleh kedua harian tersebut. Dari bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula.
2. Mengidentifikasi penyebab masalah, hal ini berkaitan dengan bagaimana kedua harian tersebut membingkai siapa dan apa yang dianggap sebagai tokoh utama yang diangkat dalam pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi.
3. Evaluasi moral, bagaimana kedua surat kabar harian tersebut memberitakan penilaian yang menguatkan argumentasi pada setiap tindakan, kegiatan, sikap, komentar yang terjadi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi.

4. Saran penanggulangan masalah, pada tahap ini berkaitan dengan langkah-langkah dan strategi yang disarankan untuk memberikan penyelesaian-penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Surat Kabar Kompas

4.1.1.1 Sejarah Perkembangan Surat Kabar Kompas

Sejarah terbitnya surat kabar Kompas tidak dapat dipisahkan dengan pergolakan orde lama. Cikal bakal terbitnya Kompas muncul atas ide dari pelaku sejarah pergolakan tersebut yang gugur sebagai Pahlawan revolusi, yaitu Letjen Ahmad Yani (1922-1965). Letjen Ahmad Yani yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI AD menghubungi salah satu rekan sekabinetnya, yakni Drs. Frans Seda, guna menerbitkan surat kabar yang bisa menyaingi dan mengimbangi pers komunis.

Drs. Frans Seda juga menyanggupi dan mempunyai satu pemikiran dengan sang pencetus ide. Dia memematangkan penerbitan surat kabar tersebut bersama Ignatius Josef Kasimo, rekan sesama partai Katoliknya. Hal juga didukung oleh Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama, keduanya aktif memimpin majalah Intisari.

Petrus Kanisius Ojong dan Jacob Oetama sebagai Praktisi Pers, tertarik dengan ide dan ajakan Ahmad Yani tersebut. Kemudian mereka pun mempersiapkan sebuah nama "Bentara Rakyat", yang secara tegas mendefinisikan visi dan misinya sebagai pembela rakyat

sesungguhnya. Berbeda dengan surat kabar yang mempunyai ideologi komunis bentukan dari Partai Komunis Indonesia.

Ketika *Bentara Rakyat* akan terbit, Drs. Frans Seda yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perkebunan mendatangi Presiden Soekarno untuk urusan kenegaraan. Soekarno menanyakan nama koran yang akan terbit pada Frans Seda, dan dijawablah "*Bentara Rakyat*", sebagai koran yang dimaksudkan Soekarno. Kemudian Soekarno menanggapi dan mengusulkan jika nama koran tersebut diubah dengan nama "*Kompas*". Presiden beranggapan bahwa nama *Kompas* akan mampu dijadikan petunjuk arah yang jelas bagi pembacanya, sebagaimana arti sesungguhnya alat navigasi "*Kompas*" berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin.

Nama *Kompas* pun resmi menjadi nama surat kabar hasil ide Ahmad Yani tersebut, sedangkan nama asalnya, yaitu *Bentara Rakyat* dijadikan nama yayasan yang menerbitkan surat kabar *Kompas*. Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar *Kompas* terbit edisi perdana dengan tebal empat halaman. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Penerangan No. 003N/SK/DPHMSIT/1965 tertanggal 9 Juni 1965.

Pada bulan pertama terbit, surat kabar *Kompas* menerima banyak kritikan dan komentar dari berbagai pihak. Nama *Kompas* menjadi bahan plesetan berbagai pihak, contohnya nama *Kompas* dipajangkan menjadi "*Komando Pas Seda*". Tidak ketinggalan pula Partai Komunis Indonesia sebagai "*Lawan Jurnalistik*" *Kompas*, memberikan julukan yang menyudutkan yaitu "*Komando Pastor*".

(Hamad, 2002 :116). PKI tahu bahwa pendiri surat kabar Kompas adalah aktivis Partai Katolik yang beragama Katolik.

Situasi dan kondisi yang tidak menentu pada masa Orde Lama, mempengaruhi perkembangan Kompas. Penghentian penerbitan beberapa surat kabar sehubungan dengan G 30 S/PKI juga dialami Kompas, tepatnya tanggal 2 Oktober 1965, Kompas diperintahkan untuk menghentikan penerbitannya. Tidak lama kemudian Kompas kembali terbit tanggal 6 Oktober 1965, karena kondisi negara membaik.

Saat itu Kompas hanya memiliki SDM tidak lebih dari 10 orang redaksional dan bagian bisnis. Tahun 1972, Kompas yang semula berkantor redaksi di Jl. Pintu Besar Selatan 86-88, pindah ke lokasi yang lebih strategis di Jl. Palmerah Selatan 22-26. Sebelum pindah, kantor redaksi Kompas sangat sederhana karena harus berbagi ruangan dengan redaksi majalah Intisari. Surat kabar yang terbit dari Jakarta ini menggunakan percetakan milik PN. Eka Grafika.

Satu bulan mempercayakan cetakan surat kabarnya di PN. Grafika, Kompas beralih ke percetakan lain, kali ini bekerja sama dengan percetakan milik BM. Diah yaitu percetakan Masa Merdeka. Dengan perhitungan yang tepat, Kompas mendapatkan keuntungan dengan berpindah cetak ke Masa Merdeka. Mesin cetak yang digunakan Masa Merdeka telah menggunakan mesin rotasi, sehingga hasil cetakannya lebih memuaskan. Kondisi ini berpengaruh pada kualitas dari hasil tampilan Kompas, sehingga mampu mengangkat oplah sampai seratus persen.

Kebijaksanaan dalam bekerja sama dengan beberapa percetakan terbit kembali muncul. Kompas menjajaki kerja sama dengan PT. Kinta, yang saat ini diakui sebagai salah satu percetakan terbaik. Pilihan Kompas mempercayakan cetakannya pada PT. Kinta kembali memberi harapan lebih. Oplah Kompas meningkat hingga 15.000 eksemplar. Hingga pada tahun 1972 Kompas akhirnya mempunyai percetakan sendiri yang diberi nama PT. Gramedia.

Di masa orde baru Kompas mengalami larangan terbit seiring dengan peristiwa Malari tahun 1978. tercatat enam surat kabar terbit di masa itu mnelami nasib yang sama dengan mekanisme pencabutan SIUPP. Keenam surat kabar tersebut antara lain, *Sinar Harapan*, *The Indonesian Times*, *Pelita*, *Sinar Pagi*, dan *Pos Sore*.

Tidak berbeda dengan kejadian sebelumnya, Kompas mendapat izin terbit kembali. Surat kabar ini menunjukkan perkembangan yang pesat dengan oplah mencapai 30.000 eksemplar di tahun 1982. Seiring dengan berjalannya waktu, Kompas semakin menunjukkan eksistensinya di dunia penerbitan Indonesia dengan oplah yang terus meningkat.

Saat ini permodalan Kompas masih dimiliki Yayasan Bentara Rakyat, Yayasan Kompas Gramedia Sejahtera, PT. Gramedia, PT. Transito Asri Media dan atas nama perseroan seperti Jacob Oetama, Frans Seda dan P. Iswantoro.

Melalui izin terbit dari Menpen No. 001/Menpen/SIUPP/A.7/1985, tertanggal 10 November 1985, saat ini Kompas mengembangkan sayapnya dengan menggunakan

teknologi cetak jarak jauh, agar dapat dikonsumsi pembaca di luar Jakarta dengan waktu terbit normal.

Semakin berkembangnya teknologi internet global yang juga menyediakan fasilitas untuk Jurnalistik Online, Kompas pun mulai menyajikan beritanya melalui media ini. Dengan situs *www.Kcm.com*, Kompas dapat diakses selama 24 jam secara online. Situs ini dikunjungi lebih dari 100.000 orang dalam setiap harinya. Akurasi dan aktualitas berita yang ditampilkan mampu menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat.

4.1.1.2 Sirkulasi, Oplah, dan Profil Pembaca Kompas

Kepercayaan pembaca Kompas semakin bertambah seiring dengan kenaikan oplah yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan hasil Audit Independen Prasetyo Utomo & Co Jakarta beserta perhitungan pada publikasi Audit Bureau Of Circulation (ABC) di Sidney Australia, Kompas mengawali oplah rata-rata sebesar 7.739 eksemplar setiap harinya. Dalam jangka waktu lima tahun kemudian (1970) oplahnya meningkat sepuluh kali lipat menjadi 77.160 eksemplar. Hingga pada dekade 1990-an Kompas kembali mengalami peningkatan oplah yang spektakuler, hingga mencapai 600.000 eksemplar setiap hari.

Sebagai surat kabar Nasional, Kompas tersebar di semua propinsi di Indonesia. Sirkulasi terbanyak masih di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) yang mencapai 63 % dengan rincian distribusi per hari.

1. Sumatera	: 38.083
2. Jabotabek	: 288.943
3. Jabar	: 124.133
4. Jateng	: 48.843
5. Jatim	: 11.273
6. Bali dan Indonesia Timur	: 10.250

(Kompas Media Kit 2004)

Untuk jumlah pembaca yang merujuk pada hasil survei dari lembaga AC Nielson pada tahun 1999, dari populasi 27.622.223 keseluruhan di kawasan Jabotabek, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Makasar terdata 2.270.000 orang yang membaca Kompas. Data ini belum termasuk kawasan lain. Berdasarkan wacana sepiantas tersebut, dapat disimpulkan surat kabar ini berada pada jajaran terdepan jumlah pembaca, oplah dan sirkulasi media cetak di Indonesia.

Dengan mengusung idealisme, tercapainya misi "Amanat Hati Nurani Rakyat" yang sekaligus menjadi merk dagang (*Brand Market*) surat kabar Kompas membidik kelas menengah ke atas. Dari segi umur, pembaca surat kabar Kompas terbesar berkisar pada umur 24 – 40 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan pembacanya, menurut Litbang Kompas tahun 1999 dalam Kompas Media Kit 2004 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Lulus SD | : 0.7% |
| 2. Lulus SLTP | : 2.49% |
| 3. Lulus SLTA | : 24.95% |
| 4. Akademi/D1/D2 | : 10.52% |
| 5. Sarjana Muda | : 8.20% |
| 6. S1 | : 45.64% |
| 7. S2/S3 | : 7.50% |

Dari data diatas dapat disimpulkan pembaca surat kabar Kompas terbanyak orang berpendidikan tinggi. Pembaca dengan tingkat pendidikan S1 (Strata satu) atau sarjana sebanyak 45.64%. kedalaman analitis pemberitaan dan tampilan surat kabar Kompas mampu membentuk segmentasi pembaca.

Sedangkan berdasarkan hasil survei AC Nielsen dalam data AC Nielsen Media Indeks 1999, prosentase penghasilan pembaca dari surat kabar Kompas adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. > Rp. 1.500.000 | : 33.2% |
| 2. Rp. 1000.000 – Rp. 1.500.000 | : 20% |
| 3. Rp. 700.000 – Rp. 1000.000 | : 16.7% |
| 4. Rp. 500.000 – Rp. 700.000 | : 16.3% |
| 5. Rp. 350.000 – Rp. 500.000 | : 6.7% |
| 6. Rp. 250.000 – Rp. 350.000 | : 5.1% |
| 7. < Rp. 250.000 | : 1.1% |

Data di atas dapat membuktikan bahwa surat kabar Kompas mampu membidik pasar menengah ke atas, sebagian besar jumlah pembacanya berpenghasilan lebih dari Rp. 1.500.000 dengan prosentase 33.2%. Berdasarkan gambaran tersebut, surat kabar

Kompas memang lekat dengan kalangan menengah ke atas, yang selama ini identik sebagai agen perubahan dan ujung tombak perubahan demokratisasi bangsa.

Untuk pendapatan PT. Kompas Media Nusantara, sebagai penerbit surat kabar Kompas, menurut kalkulasi PT. Cisi Utama tahun 1993 mencapai 240 Miliar Rupiah dengan laba bersih 30 Miliar Rupiah. Kalkulasi pendapatan ini masih bisa mengalami peningkatan 10 – 11 % setiap tahunnya. Sedangkan aset yang dimiliki Kompas diperkirakan mencapai 150 – 160 Miliar Rupiah.

Sebagai surat kabar yang terkemuka dan tergabung dalam rumpun usaha kelompok, Kompas Gramedia saat ini membawahi delapan divisi, yakni meliputi Divisi Pers Daerah, Surat Kabar, Majalah, Perdagangan, Percetakan, Properti, Penerbitan dan Lembaga Keuangan.

Dengan visi dan strategi jitunya, Kompas menjadi surat kabar raksasa pers Nasional bahkan Internasional. Dimulai dengan mencetak surat kabar, kini telah berkembang menjadi industri multimedia. Sedikitnya 23 usaha penerbitan berada dibawah naungan kelompok Kompas Gramedia, seperti *Serambi Indonesia*, *Sriwijaya Post*, *Pos Kupang*, *Banjarmasin Pos*, *Hoopla*, *Bola*, *Citra*, *Kontan*, *Otomotif*, *Raket*, *Warta Pramuka*, *bobo*, *Hai*, *Hidup*, *Jakarta-jakarta*, *Kawanku*, *Nova*, *Info Komputer*, *Foto Media*, *Intisari*, *Angkasa*, *Tiara* dan lain-lain.

4.1.2 Surat Kabar Republika

4.1.2.1 Sejarah Berdirinya Surat Kabar Republika

Kelahiran surat kabar Republika tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Surat kabar ini lahir sebagai perwujudan program ICMI, yang pada saat itu di ketuai oleh BJ. Habibie yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dengan ambisi komersial, perspektif politik, koneksi yang baik, Republika muncul menghadapi tantangan yang diidentifikasi pada seminar ICMI.

Melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dibentuk pada 17 Agustus 1992, ICMI menetapkan 3 (tiga) program utama. Pertama, Pengembangan *Islamic Centre*, Kedua, Pengembangan CIDIES (*Centre for Information an Development Studies*), kemudian yang ketiga adalah Penerbitan Harian Umum Republika.

Sesuai UU (Undang-Undang) Pokok Pers, penerbitan pers harus berbadan usaha. Untuk itulah Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT. Abdi Bangsa pada 28 November 1992. Satu bulan kemudian pada 19 Desember 1992, dengan dukungan ICMI surat kabar Republika memperoleh Surat Ijin Untuk Penerbitan Pers (SIUPP) yang pada saat itu media lain sangat sulit mendapatkannya. Habibie sebagai ketua ICMI sekaligus Menristek mengubah nama "Republik" menjadi "Republika". Dan pada 4 Januari 1993, Republika resmi berdiri. Perusahaan surat kabar ini mewakili konsep baru yang tegas dalam proses produksi dan pemasaran surat kabar.

Republika mengesankan membawa aspirasi Jurnalis Islam yang liberal dan sekuler dalam mengangkat isu maupun peristiwa,

tapi secara ideologis menginformasikan nilai-nilai Islam. Eratnya hubungan antara Republika dengan ICMI, sehingga untuk memahami Republika kita mesti mengetahui ICMI. Organisasi itu bukanlah sekedar perkumpulan cendekiawan Muslim, tetapi juga sebagai perhimpunan kekuatan politik Islam pada masa 70-an dan 80-an yang sering dikesampingkan oleh rezim Golkar dan Militer. Dengan motor penggerak utama BJ. Habibie, ICMI lahir dan bergerak penuh dengan muatan politik Islam. Menyadari bahwa umat Islam sering kalah dalam bidang politik karena lemah dalam pemikiran dan opini, maka ICMI mendirikan CIDIES sebagai tandingan terhadap lembaga Think-Thank Golkar, yaitu CSIS (*Central Studies for Indonesian Strategis*) dan menerbitkan surat kabar Republika sebagai penyeimbang dari pers non-Islam. (Hamad, 2002 : 120)

Republika memilih barisan penasehatnya dengan melibatkan tokoh organisasi lembaga studi pembangunan Adi Sasono, Intelektual Nur Cholis Madjid, para akademisi. Selain itu Republika juga melibatkan pakar ilmiah UGM, yakni M. Amin Rais, Prof. Edy Setyawati dari UI, ahli hukum Islam Quraish Shihab. Indikasi pengaruh koneksi lain juga dapat dilihat dari adanya fakta bahwa diantara dewan komisaris yang bertanggung jawab atas modal perusahaan PT. Abdi Bangsa adalah Wardiman Joyonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993, penyokong gagasan berdirinya ICMI sekaligus loyalitas Habibie.

Pimpinan Redaksi Parni Hadi adalah Redaktur senior kantor berita Antara dia juga seorang koresponden yang menghabiskan

waktunya di Jerman, saat ia menjalin hubungan baik dengan BJ. Habibie. Disekeliling Parni Hadi terdapat pula Jurnalis berpengalaman dan profesional, seperti Nasir Tamara (mantan wartawan Tempo, Sinar Harapan dan Warna Ekonomi), dan S. Sinar Sari Ecip (mantan koresponden senior Tempo dan Dosen Universitas Hasanudin).

4.1.2.2 Oplah, Distribusi dan Profil Pembaca Republika

Republika mendapatkan hasil yang cukup baik dari penerbitan perdananya. Oplah yang dicapai surat kabar Republika bulan Agustus 1993 adalah 125.000 eksemplar. Sedangkan pada tahun 2000 oplah Republika di kawasan Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, meningkat sebesar 335.000 eksemplar. Hasil ini belum termasuk keseluruhan daerah edar.

Surat kabar Republika terus berupaya memperluas jangkauan distribusinya mulai dari DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim hingga Sumatera, Maluku, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi. Prosentase distribusi terbesar daerah edar adalah Jabodetabek 58%, Jabar 18%, Jateng 12%, Jatim 6% dan luar Jawa 6%.

Demi kepentingan pemasaran (distribusi), Republika menggunakan sistem jarak jauh. Surat kabar ini dapat dikatakan sebagai pelopor untuk surat kabar yang menggunakan sistem ini. Dan dalam pendistribusiannya, Republika langsung menyerahkan hasil cetakannya ke agen besar di setiap daerah pemasaran. Demi mendongkrak pemasaran harian ini melakukan program barter dengan media lain, baik media cetak maupun media elektronik di

samping membuka Republika Online. Sebagai badan usaha Republika termasuk kategori marginal pers bersama media Islam lain.

Sebagai koran Nasional terbesar di Indonesia, harian Republika melakukan serangkaian program guna peningkatan kualitas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan informasi yang lebih komplit, akurat dan berbobot. Para pembaca harian Republika mayoritas berada pada usia muda. Menurut penelitian *polling Centre* Juni 2005, konsumen (pembaca) tetap harian Republika 59,5% adalah laki-laki, sedangkan yang 40,1% adalah wanita. Untuk pembaca potensial harian ini mencapai 64% laki-laki dan 36% wanita.

Untuk tingkat pendidikan pembaca Republika adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------|
| 1. SD – SMP | : 4% |
| 2. SMU – Diploma | : 36,4% |
| 3. Sarjana | : 36,8% |
| 4. Pasca Sarjana | : 6,3% |
| 5. Pernah Kuliah | : 17,4% |

Tingkat ekonomi pembaca harian Republika terbesar, yaitu 69% berpenghasilan dibawah 1 (satu) Juta Rupiah, sedangkan 12% berpenghasilan diatas 1 (satu) sampai 2 (dua) Juta Rupiah dan sisanya diatas 2 (dua) Juta Rupiah. Sebagai harian komunitas Muslim terbesar, kloran ini juga dikonsumsi (dibaca) oleh khalayak luas. Dari data hasil penelitian sejenis menampilkan fakta 92,1% pembaca (konsumen) tetap berasal dari kaum Muslim. 5,8% konsumen

beragama Katolik dan 2,1% beragama Protestan. Sementara pembaca potensial harian ini sebesar 86% beragama Islam, sedangkan untuk agama Katolik sebanyak 6%, dan yang 8% beragama Protestan.

4.1.2.3 Kebijakan Redaksional Republika

Sejak berdirinya dengan motto "Bukan Sekedar Menjual Berita", harian Republika selalu ingin memenuhi kebutuhan pembacanya. Upaya untuk mendekatkan diri dengan pembaca menjadi suatu bentuk inspirasi bagi harian Republika dalam mengemas produknya yang berkualitas dan inovatif.

Visi Republika adalah menjadi perusahaan media cetak terpadu berskala Nasional serta dikelola secara profesional islami, sehingga berpengaruh pada proses pencerdasan bangsa, pengembangan kebudayaan, serta peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia baru. Sajikan yang bervisi diusahakan untuk selalu ditampilkan, sekalipun terkadang gagal atau justru melenceng dari yang semestinya.

Sedangkan misi dari harian Republika adalah sebagai berikut:

1. Pencerdasan bangsa melalui pendalaman wawasan yang berbasis komunitas melalui pemberitaan yang akurat, aktual, terpercaya, edukatif serta membela keadilan dan kebenaran.
2. Meningkatkan dan menguatkan prestasi dan dedikasi individu menjadi sebuah tim sebagai kunci untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan.

Ideologi harian Republika adalah pemiliknya, yakni PT. Abdi Bangsa, yaitu kebangsaan, kerakyatan, keIslaman dengan tujuan mempercepat *civil society*. Orientasi inilah yang sehari-harinya dituangkan harian ini dalam bentuk informasi dan sajian lainnya. Republika menampilkan Islam dalam wajah moderat.

Sebagai koran Islam, Republika memang tergolong liberal. Republika selalu berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberikan inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi. Dari sinilah tampak jelas jika Republika mendefinisikan misinya "Berbasis Komunitas" dengan semua isi berita adalah tentang komunitas dan sebisa mungkin menghindari politik pada media.

Sekalipun demikian tidak dapat dihindari bahwa komunitas yang dimaksud adalah komunitas Muslim. Hal ini tampak pada pemberitaan Republika yang sangat rajin menggandakan kepentingan Islam, termasuk rubrik-rubrik bertema Islam seperti "Kolom Hikmah", "Dialog Jumat", "Dompot Duafa", dan "Lembaran Haji". Tentu saja strategi ini terkait dengan target audience Republika yang beragama Islam, golongan profesional, manajer, eksekutif, pelajar, mahasiswa, dan pengusaha dengan mengambil pasar berskala nasional. (Hamad, 2002 : 122)

Dari hasil riset pasar, terdapat muatan yang di inginkan pembaca yang tersaji di Republika. Muatan berita itu adalah tentang keislaman, kesehatan, pendidikan, politik luar dan atau luar negeri,

ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, bisnis, syariah, keluarga, hukum dan olah raga.

Republika mempunyai slogan "All You Can Read", sekaligus menjadikan hal tersebut tantangan bagi Republika untuk selalu menjadi yang terdepan dalam memuaskan pembaca. Salah satu majalah nasional menyebut harian Republika sebagai "Bidan spesialis halaman sisipan". Julukan tersebut muncul karena dalam sepanjang sejarah Republika sisipan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat kabar ini.

Sisipan atau suplemen merupakan ciri khas dari harian Republika. Upaya ini merupakan oase bagi pembaca yang membutuhkan informasi lebih mendalam, lebih kaya atau lebih bervariasi. Sebut saja tabloid dialog Jumat dan Rekor dengan format tabloid 16 halaman. Keduanya mengupas isu mengenai keislaman dan olah raga.

Suplemen yang ditampilkan Republika cukup beragam, mulai dari suplemen pendidikan, kesehatan, probis, otomotif, sampai manajemen qolbu. Pada 5 Januari 2005 Republika mengalami perubahan mendasar dari sisi desain, penajaman rubrikasi serta penambahan suplemen baru, yaitu keuangan, medika, telekomunikasi dan selular, *property*, dan elektronika.

Harian Republika selalu berusaha membuat perubahan positif demi kemajuannya, namun tidak ingin terjerumus pada aura kebebasan yang berlebihan. Harian ini mencoba terus berpegang teguh pada komitmen untuk selalu menyajikan informasi yang ramah dan aman untuk keluarga, santun serta komunikatif.

Hasil polling centre Juni 2005 menjelaskan dari hasil penelitian menyangkut kualitas redaksional menyatakan harian Republika berada pada nilai *good performance* dalam hal penyajian berita utama, aktualitas berita, tema, kelengkapan dan kepadatan serta rubrikasi bahkan gaya bahasanya. Sedangkan dari sisi artistik penelitian menemukan fakta, tampilan muka menarik, kesesuaian foto dengan berita, jenis dan ukuran huruf serta kualitas kertasnya juga berada pada nilai *good performance*.

Masih berdasarkan hasil dari polling centre, menjalani tahun yang ke 12 ini Republika dilihat sebagai koran bernuansa Islami dengan cakupan berita yang luas. Republika memiliki gaya bahasa yang sederhana sehingga mudah dibaca, dimengerti dan dipahami oleh semua kalangan, dari ibu rumah tangga, anak-anak hingga orang dewasa dan cendekiawan. (Republika Media Replika, 1 Juli 2005)

4.2 Hasil dan Pembahasan

Surat kabar harian Kompas yang dijadikan bahan penelitian adalah edisi :

1. 14 Oktober 2008, “Pengesahan Dikhawatirkan Ganggu Keutuhan NKRI”.
2. 17 Oktober 2008, “Bamus Minta RUU Pornografi Didalami Lagi”..
3. 27 Oktober 2008, “Dipaksa Selesai Pembahasannya”.
4. 29 Oktober 2008, “PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi”.

Sedangkan yang terdapat dalam surat kabar harian Republika adalah edisi :

5. 21 Oktober 2008, “Definisi Pornografi Mengarah Ke Voting”.
6. 26 Oktober 2008, “RUU Pornografi Tak Berangus Budaya”.
7. 27 Oktober 2008, “Tak Ada Alasan Menunda Pengesahan RUU Pornografi”.
8. 29 Oktober 2008, “RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna”.

Berita-berita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di surat kabar harian Kompas dan Republika kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* per item berita. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang berita-berita di atas, maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Tabel 2
Berita Pada Surat Kabar Harian Kompas

No	Judul	Isi Berita	Nara Sumber
1	Pengesahan Dikhawatirkan Ganggu Keutuhan NKRI	Penolakan sekelompok orang di beberapa daerah terkait pengesahan RUU Pornografi. Penolakan dilakukan oleh warga Bali, Manado dan Bandung. Mereka mengkhawatirkan jika pengesahan RUU Pornografi dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Made Mangku Patika (Gubernur Bali), Agung Sasongko (Anggota Pansus)
2	Bamus Minta RUU Pornografi Didalami Lagi	Hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang akan mendalami lagi RUU Pornografi. Hal ini terkait dengan peta politik yang terjadi di DPR dari kelanjutan pembahasan mengenai RUU tersebut. Dan menyusul kontroversi yang terus berlangsung, banyak pihak yang mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.	Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR), Agung Sasongko (Wakil Ketua Pansus RUU Pornografi), beberapa tokoh Agama

3	Dipaksa Selesai Pembahasannya	Pembahasan RUU Pornografi yang akan dibawa ke tingkat panitia kerja dipaksa selesai, padahal masih ada beberapa pasal yang ada titik temunya atau belum selesai dibahas. Kompas juga memberitakan aksi-aksi penolakan RUU Pornografi yang semakin meruncing dan adu argumen antara Balkan Kaplele yang pro RUU dengan Kamala Chandrakirana yang kontra. Selain itu harian ini juga mengutip pendapatnya Prof. Benny Hoed, yang menilai RUU tersebut berbahaya karena sudah menjadi artefak dan yang dipersoalkan bukan lagi teksnya.	Latifah Iskandar (Anggota Panja F-PAN), Balkan Kaplele (Ketua Pansus RUU Pornografi), Kamala Chandra kirana (Ketua Komnas Perempuan), Prof. Benny Hoed (Dosen UI)
4	PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi	Penolakan PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi. Alasannya, karena Panja belum menerima perbaikan pasal-pasal yang oleh PDI-P dinilai prinsipil. Hal ini diungkapkan Wila Chandrawila Supriadi. Pasal yang disebut adalah pasal 1 tentang pornoaksi dimana terdapat frase gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum. Selain itu Kompas juga mengutip komentar dari Badriyah Fayumi yang menyatakan RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat dua dan F-KB mengajak pemerintah menyosialisasikan RUU Pornografi terutama kepada yang menolak serta komentar dari Azliani Agus yang menyatakan PAN ingin ikut serta menyelamatkan moral bangsa dari keterpurukan akibat maraknya pornografi.	Wila Chandrawila Supriadi (Juru bicara F-PDI-P), Badriyah Fayumi (Juru bicara F-KB), Azliani Agus (Juru bicara F-Pan)

Tabel 3
Berita Surat Kabar Harian Republika

No	Judul	Isi Berita	Nara Sumber
1	Definisi Pornografi Mengarah Ke Voting	Voting RUU Pornografi yang mendekati kenyataan. Namun FPDIP dan FPDS tidak sepakat dengan pasal 1 soal definisi Pornografi. Menurut mereka kata Gerak Tubuh harus dihilangkan karena kata itu multitafsir. Republika mengutip komentar Balkan Kaplele bahwa FPDIP dan FPDS tidak sepakat, karena ingin mengulur waktu saja. Selain itu Republika juga memberitakan semakin kuatnya dukungan terhadap disahkannya RUU Pornografi.	Balkan Kaplele (Ketua Pansus RUU Pornografi)
2	RUU Tak Berangus Budaya	Himbauan dari Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) RI Dr. Adhyaksa Daud bagi masyarakat yang menolak RUU Pornografi agar duduk bersama dan berdialog untuk membedah RUU ini secara akademis, jangan hanya menolak tanpa alasan. Dia menilai RUU ini justru akan melindungi generasi muda. Republika juga memberitakan tentang semakin banyaknya masyarakat yang menuntut RUU Pornografi cepat disahkan. Selain itu Republika mengutip komentar KH M Zainul Majdi MA, yang menyatakan mendukung pada setiap aksi yang mendukung pengesahan RUU Pornografi demi menyelamatkan masa depan bangsa.	Adhyaksa Daud (Menpora RI), KH M Zainul Majdi MA (Gubernur NTB)

3	Tidak Ada Alasan Menunda Pengesahan RUU Pornografi	Pemerintah diminta memanggil Kepala Daerah yang menolak RUU Pornografi untuk diberikan penjelasan secara komprehensif terkait RUU ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari salah paham atas informasi mengenai RUU tersebut. Republika mengutip beberapa komentar, KH Sahal Mahfudz menilai bahwa pembahasan RUU Pornografi saat ini seperti berjalan ditempat, padahal RUU itu upaya untuk menyelamatkan moral bangsa dari bencana jaringan industri seks global. Sedangkan Maftuh Basyuni berharap RUU ini segera disahkan. Menurutnya RUU ini sudah menjadi tekad semua pihak. Dalam edisi ini Republika kembali memberitakan tentang semakin menguatnya dukungan terhadap disahkannya RUU Pornografi.	KH Sahal Mahfudz (Ketua Umum MUI), Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI)
4	RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna	Kesepakatan beberapa fraksi yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan sebagai UU. Ada delapan fraksi yang setuju RUU ini dibawa ke rapat paripurna dan dua fraksi lainnya menolak, yakni fraksi PDIP dan fraksi PDS. Fraksi Partai Golkar menyatakan RUU ini sudah memenuhi syarat untuk diselesaikan. Hal itu disampaikan oleh anggota FPG di pansus, Irsyad Sudiro. Dia juga mengatakan RUU ini akan disahkan Kamis 30 Oktober. Selain itu Republika juga mengutip pernyataan Juru Bicara FPAN yang menyatakan beberapa alasan negara Indonesia membutuhkan RUU Pornografi. Ketua pansus, Balkan Kaplale yang mengatakan dirinya akan bertemu Ketua DPR, Agung Laksono untuk membicarakan waktu paripurna bagi RUU Pornografi.	Irsyad Sudiro (anggota Partai Golkar), Azliani Agus (Juru Bicara Fraksi PAN), Balkan Kaplale (Ketua Paansus).

4.2.1 Analisis Framing Isu RUU Pornografi Pada Surat Kabar Harian Kompas Dan Republika

- a. Isu mengenai RUU Pornografi ini mulai mengemuka pada tahun 2006. RUU yang mengatur pornografi ini bermula dari semakin meluasnya perkembangan pornografi di Indonesia, dimana banyak masyarakat yang menilai harus ada UU yang mengatur tentang pornografi. Namun seiring dengan pembahasan mengenai RUU Pornografi kontroversi yang terjadi di masyarakatpun semakin meluas antara yang pro dan kontra RUU ini. Sebagian masyarakat menilai RUU ini hanya akan memunculkan konflik horizontal dan akan mengganggu keutuhan NKRI. Selain itu, Indonesia masih belum siap dalam hal implementasi jika RUU ini disahkan menjadi UU. Namun di sisi lain sebagian masyarakat menilai RUU ini dapat menyelamatkan moral bangsa dari perkembangan pornografi, sehingga RUU ini harus segera disahkan. Hal ini yang membuat pemerintah terus mengkaji RUU ini serta menunda pengesahannya. Seiring dengan kontroversi yang semakin meluas terkait RUU ini, berbagai media nasional saling berlomba-lomba memberitakan isu ini, dari media elektronik sampai media cetak. Ada dua pandangan yang berkembang di seputar kasus ini.
 - i. *Pertama*, ada yang menyatakan RUU Pornografi sebagai pemicu konflik. Konflik politik yang terjadi di DPR dalam mekanisme pembahasan RUU Pornografi antara perwakilan fraksi parpol yang satu dengan yang lain. Adu pendapat antara yang pro dan kontra semakin memanas dengan argumennya masing-masing. Rupanya konflik ini terbawa di masyarakat. Aksi-aksi penolakan

maupun dukungan yang dilakukan terhadap disahkannya RUU Pornografi menjadi UU semakin meluas. Beberapa kalangan mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal jika kontroversi ini terus berlanjut.

- ii. *Kedua*, ada yang menyatakan RUU Pornografi dapat menyelamatkan moral bangsa. *Untuk* mengantisipasi perkembangan pornografi, maka dibutuhkan peraturan yang tegas dalam mengatur masalah pornografi. RUU ini juga dapat melindungi kaum perempuan dan anak dari kejahatan pornografi. Adanya UU yang mengatur pornografi akan menyelamatkan generasi muda dari kejahatan moral akibat pornografi. Maka dari itu, RUU Pornografi diharapkan untuk segera disahkan.
- iii. Masing-masing media saling menggunakan klaim kebenaran untuk meyakinkan khalayak bahwa pandangan mereka yang paling benar dan paling rasional. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh masing-masing media untuk mendukung gagasannya?

4.2.1.1 Frame Surat Kabar Harian Kompas : Kasus Politik

Harian Kompas menurunkan laporan mengenai RUU Pornografi ini pada edisi 14-29 Oktober 2008. Ada empat berita yang ditulis oleh Kompas. Masing-masing dengan judul "Pengesahan Dikhawatirkan Ganggu Keutuhan NKRI" sebagai tulisan utama, disusul "Bamus Minta RUU Pornografi Didalami Lagi". Kemudian, "Dipaksa Selesai Pembahasannya" dan "PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi".

a. Problem Identification : Wartawan surat kabar harian Kompas mengidentifikasi isu mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi sebagai masalah politik. Segala hal yang berkaitan dengan RUU Pornografi tidak lepas dari aspek politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi berita yang didominasi dengan adu argumen antara para perwakilan fraksi parpol yang ada di DPR. Adu argumen ini mewarnai pembahasan RUU Pornografi. Tidak hanya itu, Kompas menganggap bahwa kontroversi yang terjadi di masyarakat adalah akibat dari peta politik di DPR yang masih terbelah terkait pembahasan RUU Pornografi, ada fraksi yang memaksakan RUU ini segera disahkan, tapi ada juga yang menghendaki ditunda. Kontroversi yang terus terjadi di masyarakat ini yang kemudian dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memunculkan konflik horizontal yang akan mengganggu keutuhan NKRI. Sebagai konsekuensi dari melihat masalah ini sebagai masalah politik, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang politik. Walaupun ada sumber yang bukan berlatar belakang politik, namun pendapatnya hanya sebagai pendukung. Selain itu, penempatan berita Kompas lebih banyak menempatkan berita mengenai RUU Pornografi di rubrik politik.

No	Judul	Isi Berita	Nara Sumber
1	Pengesahan Dikhawatirkan Ganggu Keutuhan NKRI	Penolakan sekelompok orang di beberapa daerah terkeit pengesahan RUU Pornografi. Penolakan dilakukan oleh warga Bali, Manado dan Bandung. Mereka mengkhawatirkan jika pengesahan RUU Pornografi dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Made Mangku Patika (Gubernur Bali), Agung Sasongko (Fraksi PDI-P)
2	Bamus Minta RUU Pornografi Didalami Lagi	Hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang akan mendalami lagi RUU Pornografi. Hal ini terkait dengan peta politik di DPR yang masih terbelah. Menyusul kontroversi yang terus berlangsung, banyak pihak yang mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.	Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB), Agung Sasongko (Fraksi PDI-P)
3	Dipaksa Selesai Pembahasannya	Pembahasan RUU Pornografi yang akan dibawa ke tingkat panitia kerja dipaksa selesai, padahal masih ada beberapa pasal yang ada titik temunya atau belum selesai dibahas. Kompas juga memberitakan aksi-aksi penolakan RUU Pornografi yang semakin meruncing dan adu argumen antara Balkan Kaplele yang pro RUU dengan Kamala Chandrakirana yang kontra. Selain itu harian ini juga mengutip pendapatnya Prof. Benny Hoed, yang menilai RUU tersebut berbahaya karena sudah menjadi artefak dan yang dipersoalkan bukan lagi teksnya.	Latifah Iskandar (Anggota Panja F-PAN), Balkan Kaplele (Ketua Pansus RUU Pornografi), Kamala Chandra kirana (Ketua Komnas Peremuan), Prof. Benny Hoed (Dosen UI)

4	PDI-P Tolak Setujui RUU Pornografi	Penolakan PDI-P untuk menyetujui pengesahan RUU Pornografi. Alasannya, karena Panja belum menerima perbaikan pasal-pasal yang oleh PDI-P dinilai prinsipil. Hal ini diungkapkan Wila Chandrawila Supriadi. Pasal yang disebut adalah pasal 1 tentang pornoaksi dimana terdapat frase gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum. Selain itu Kompas juga mengutip komentar dari Badriyah Fayumi yang menyatakan RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat dua dan F-KB mengajak pemerintah menyosialisaikan RUU Pornografi terutama kepada yang menolak.	Wila Chandrawila Supriadi (Juru bicara F-PDI-P), Badriyah Fayumi (Juru bicara F-KB), Azliani Agus (Juru bicara F-Pan)
---	------------------------------------	---	---

b. Causal Interpretation : Dalam keseluruhan berita, Kompas memposisikan RUU Pornografi yang dianggap sebagai penyebab masalah. RUU Pornografi yang ditempatkan sebagai sebab yang mengakibatkan berbagai masalah tersebut. Konflik politik di DPR disebabkan oleh pembahasan RUU Pornografi, khususnya dalam hal substansial. RUU ini juga dianggap sebagai penyebab adanya kontroversi di masyarakat yang kemudian dikhawatirkan akan muncul konflik horizontal dan dapat mengganggu keutuhan NKRI. Pendapat Anggota DPR, Agung Sasongko yang menilai terlalu berbahaya memaksakan RUU itu untuk disahkan, karena akan menyebabkan konflik horizontal. Selain itu, komentar Gubernur Bali, Made Pastika yang menyatakan RUU ini hanya akan mempersulit penerapannya jika sudah disahkan.

”Terlalu mahal jika NKRI dan Pancasila kita hancurkan hanya oleh satu UU seperti ini. RUU ini hanya mempersulit penerapannya nanti karena di satu sisi kita harus taat, tetapi di sisi lain tidak selaras dengan prinsip otonomi”.

Pada edisi lain, Kompas kembali menyitir pendapat Agung Sasongko dari fraksi PDI-P. Ia menilai lahirnya RUU Pornografi dipaksakan, padahal masyarakat Indonesia belum siap dengan RUU ini. Ketika hal ini dipaksakan, maka dikhawatirkan muncul konflik horizontal.

”Belum waktunya lahir, tetapi ingin dipaksakan”

Sementara itu fraksi lain berpendapat optimis akan segera disahkannya RUU Pornografi. Maka dari itu, mereka tetap menyerahkan semua pada proses mekanisme politik di DPR. Misalnya menurut Husein Abdul Azis dari fraksi Partai Demokrat yang optimis segera disahkannya RUU Pornografi karena sudah banyak mengalami perubahan besar.

Di bagian lain, Kompas juga mengutip hasil wawancaranya dengan ahli semiotik UI, Benny Hoed yang menyatakan RUU Pornografi yang diperdebatkan berbahaya karena sudah menjadi artefak, dimana yang dipersoalkan bukan lagi isi teksnya.

”Ada yang menilai RUU Pornografi itu sebagai ‘penyelamat’. Ada yang mengatakan RUU itu berpotensi memecah belah bangsa karena akan menimbulkan persoalan-persoalan yang menyangkut kultur dan agama”.

Dari sini sudah mulai kelihatan, bagaimana RUU Pornografi dalam keseluruhan berita ditempatkan sebagai penyebab masalah dari semua persoalan yang muncul. Kontroversi yang selama ini muncul, baik di DPR maupun di masyarakat itu disebabkan oleh adanya RUU Pornografi.

a. *Moral Evaluation* : Surat kabar ini menilai bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi akan menyebabkan konflik horizontal pada masyarakat Indonesia serta dapat mengganggu keutuhan NKRI. Dalam beritanya secara keseluruhan, Kompas menilai bahwa dampak yang disebabkan RUU ini sangat luas, lebih-lebih dalam kehidupan sosialnya. Ketika keutuhan NKRI harus ditukar dengan UU yang mengatur pornografi. Tidak mengherankan jika Kompas mempunyai penilaian seperti itu terhadap RUU Pornografi, mengingat aksi penolakan yang semakin menguat di setiap daerah terkait dengan pengesahan RUU ini. Pemerintah dan DPR harus dapat mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan pengesahan RUU ini menjadi UU. Namun di sisi lain Rancangan Undang-Undang Pornografi perlu dilihat dalam konteks perlawanannya terhadap Industri pornografi. Kelompok ini yang menikmati keadaan bila RUU ini tidak disahkan.

b. *Treatment Recommendation* : Secara tidak langsung Jurnalis harian Kompas merekomendasikan bahwa negara Indonesia belum siap dalam hal penerapan Undang-Undang Pornografi. Demi menghindari konflik horizontal di masyarakat, sebaiknya DPR tidak memaksakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi tersebut.

Frame : Berita Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dimaknai sebagai politik.

<i>Problem Identification</i>	Masalah politik.
<i>Causal Interpretation</i>	RUU Pornografi
<i>Moral Evaluation</i>	Kontroversi yang terus terjadi dikhawatirkan akan memunculkan konflik horisontal yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<i>Treatment Recommendation</i>	DPR tidak memaksakan pengesahan RUU Pornografi, dengan pertimbangan konflik yang ditimbulkan di masyarakat.

4.2.1.2 Frame Surat Kabar Harian Republika : Kasus Politik

1. Surat kabar harian Republika menurunkan laporan pada edisi 21-29 Oktober 2008. ada empat berita yang ditulis oleh Republika mengenai RUU Pornografi. Masing-masing dengan judul "Definisi Pornografi Mengarah Ke Voting", disusul "RUU Pornografi Tak Berangus Budaya" berisi tentang wawancara dengan Menpora, Adhikari Dault. Kemudian "Tak Ada Alasan Menunda Pengesahan RUU Pornografi", dan "RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna".

a. *Problem Identification* : Frame yang dikembangkan harian Republika, isu mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi dipandang sebagai masalah politik. Dari keseluruhan berita yang ditulis wartawan Republika yaitu membahas tentang mekanisme politik di DPR dalam proses pengesahan RUU ini. Dari sumber yang dijadikan sumber berita berlatar belakang politik. Mereka adalah perwakilan fraksi parpol yang ada di DPR untuk

membahas pengesahan RUU Pornografi. Adu argumen dari setiap fraksi ini yang mewarnai mekanisme politik dari proses pengesahan RUU ini. Kontroversi yang terjadi di masyarakat juga tidak lepas dari konflik dikalangan elit politik di atas. Upaya untuk mendapatkan kata sepakat terkait pengesahan RUU Pornografi terus menemui jalan buntu, karena adanya sebagian perwakilan fraksi yang belum menyetujui pengesahan dilakukan. Berbagai alasan diutarakan untuk membuat pengesahan RUU ini ditunda. Konflik tersebut yang membuat DPR lamban dalam mengesahkan RUU ini menjadi UU. Mereka harus mengkaji lagi isi dari RUU Pornografi dengan mendengarkan perwakilan dari setiap fraksi yang berwenang dalam proses pengesahan RUU ini.

Tabel 3
Berita Surat Kabar Harian Republika

No	Judul	Isi Berita	Nara Sumber
1	Definisi Pornografi Mengarah Ke Voting	Voting RUU Pornografi yang mendekati kenyataan. Namun FPDIP dan FPDS tidak sepakat dengan pasal 1 soal definisi Pornografi. Menurut mereka kata Gerak Tubuh harus dihilangkan karena kata itu multitafsir. Republika mengutip komentar Balkan Kaplele bahwa FPDIP dan FPDS tidak sepakat, karena ingin mengulur waktu saja. Selain itu Republika juga memberitakan semakin kuatnya dukungan terhadap disahkannya RUU Pornografi.	Balkan Kaplele (Ketua Pansus RUU Pornografi), Eva Sundari (fraksi PDI-P)

2	RUU Tak Berangus Budaya	Himbauan dari Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) RI Dr. Adhyaksa Daud bagi masyarakat yang menolak RUU Pornografi agar duduk bersama dan berdialog untuk membedah RUU ini secara akademis, jangan hanya menolak tanpa alasan. Dia menilai RUU ini justru akan melindungi generasi muda. Republika juga memberitakan tentang semakin banyaknya masyarakat yang menuntut RUU Pornografi cepat disahkan. Selain itu Republika mengutip komentar KH M Zainul Majdi MA, yang menyatakan mendukung pada setiap aksi yang mendukung pengesahan RUU Pornografi demi menyelamatkan masa depan bangsa.	Adhyaksa Daud (Menpora RI), KH M Zainul Majdi MA (Gubernur NTB)
3	Tidak Ada Alasan Menunda Pengesahan RUU Pornografi	Pemerintah diminta memanggil Kepala Daerah yang menolak RUU Pornografi untuk diberikan penjelasan secara komprehensif terkait RUU ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari salah paham atas informasi mengenai RUU tersebut. Republika mengutip beberapa komentar, KH Sahal Mahfudz menilai bahwa pembahasan RUU Pornografi saat ini seperti berjalan ditempat, padahal RUU itu upaya untuk menyelamatkan moral bangsa dari bencana jaringan industri seks global. Sedangkan Maftuh Basyuni berharap RUU ini segera disahkan. Menurutnya RUU ini sudah menjadi tekad semua pihak. Dalam	Mahfudz Siddiq (fraksi PKS), Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI), Syarief Hasan (fraksi partai Demokrat)

		edisi ini Republika kembali memberitakan tentang semakin menguatnya dukungan terhadap disahkannya RUU Pornografi.	
4	RUU Pornografi Dibawa Ke Rapat Paripurna	Kesepakatan beberapa fraksi yang menginginkan RUU Pornografi dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan sebagai UU. Ada delapan fraksi yang setuju RUU ini dibawa ke rapat paripurna dan dua fraksi lainnya menolak, yakni fraksi PDIP dan fraksi PDS. Fraksi Partai Golkar menyatakan RUU ini sudah memenuhi syarat untuk diselesaikan. Hal itu disampaikan oleh anggota FPG di pansus, Irsyad Sudiro. Dia juga mengatakan RUU ini akan disahkan Kamis 30 Oktober. Selain itu Republika juga mengutip pernyataan Juru Bicara FPAN yang menyatakan beberapa alasan negara Indonesia membutuhkan RUU Pornografi. Ketua pansus, Balkan Kaplale yang mengatakan dirinya akan bertemu Ketua DPR, Agung Laksono untuk membicarakan waktu paripurna bagi RUU Pornografi.	Irsyad Sudiro (anggota Partai Golkar), Azliani Agus (Juru Bicara Fraksi PAN), Balkan Kaplale (Ketua Paansus).

b. Causal Interpretation : Dalam keseluruhan berita, Republika menilai RUU Pornografi sebagai penyebab masalah. Konflik politik di DPR terjadi karena adanya RUU Pornografi. Adu argumen di kalangan elit politik, bahkan aksi *walkout* yang dilakukan oleh beberapa perwakilan fraksi parpol juga ikut mewarnai konflik politik, sehubungan dengan rapat pembahasan RUU ini. Pada

dasarnya yang menjadi perdebatan panjang di DPR adalah mengenai substansi RUU ini. Balklan Kaplele sebagai Ketua Pansus RUU Pornografi mengakui ada beberapa pasal yang akan ditentukan melalui voting. Hal ini terkait dengan fraksi PDI-P dan fraksi PDS yang masih belum sepakat mengenai beberapa pasal dalam RUU Pornografi.

”Memang mengenai masalah definisi, FPDI-P dan FPDS belum sepakat. Mereka ingin menghilangkan kata ’gerak tubuh’. Alasan mereka, kata itu multitafsir. Tapi, menurut saya mereka hanya mengulur waktu”.

Sebenarnya seluruh fraksi tidak ingin RUU Pornografi diselesaikan lewat voting. Mereka ingin seluruh materi penting ini disetujui melalui musyawarah sebab pendapat di fraksi mencerminkan di masyarakat.

Perdebatan di DPR mengenai RUU Pornografi juga menular di masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin menguatnya aksi masyarakat yang mendukung segera disahkannya RUU Pornografi. Mengenai mereka yang menolak RUU ini, Republika mengutip hasil wawancara dengan Menpora, Adhyaksa Dault yang meminta pihak-pihak yang menolak duduk bersama dan membedah isi RUU Pornografi secara akademis, tidak asal menolak saja.

”Kalau kita *fair*, mari kita bedah isi RUU Pornografi ini secara akademis. Kita duduk bersama. Saya bersedia berdialog dan memfasilitasi”.

Pada edisi lain, Republika memberitakan konflik politik mengenai pengesahan RUU Pornografi yang semakin rumit, sehingga RUU ini harus dibawa ke rapat paripurna. Mayoritas fraksi setuju RUU ini untuk disahkan, tapi tiga fraksi lainnya tetap tidak setuju. Fraksi tersebut adalah FPDI-P, FPDS dan FBR.

”Sebanyak delapan fraksi setuju RUU ini dibawa ke rapat paripurna DPR, dan dua fraksi yang sedari awal ‘menolak’ bersikap kukuh”.

c. Moral Evaluation : Harian Republika menilai bahwa RUU Pornografi adalah salah satu upaya dalam menyelamatkan moral bangsa. RUU Pornografi juga sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan pornografi yang semakin meluas. Adanya RUU Pornografi akan melindungi generasi muda bangsa dari kerusakan moral. Selain bertujuan melindungi kaum perempuan dan anak dari kejahatan pornografi, RUU ini juga dimaksudkan untuk melindungi seni budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Republika mengutip pendapat Azliani Agus, Juru Bicara FPAN. Indonesia butuh RUU Pornografi karena empat hal. *Pertama*, RUU penting untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual. *Kedua*, ketiadaan batas yang tegas tentang pengertian pornografi dan belum mampu mengantisipasi fenomena pornografi yang terus berkembang lewat internet, telepon genggam dan televisi. *Ketiga*, banyak anak dan kaum perempuan yang menjadi korban kejahatan pornografi. *Keempat*, sudah saatnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif melapor bila ada kejahatan pornografi.

d. *Treatment Recommendation* : Dari beberapa hal di atas, Republika merekomendasikan agar RUU Pornografi segera disahkan. Sudah saatnya negara ini mempunyai hukum yang mengatur masalah pornografi.

Frame : Berita RUU Pornografi dimaknai sebagai masalah politik.

<i>Problem Identification</i>	Masalah politik.
<i>Causal Interpretation</i>	RUU Pornografi
<i>Moral Evaluation</i>	RUU Pornografi dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak, serta menyelamatkan generasi muda bangsa. Selain itu, RUU ini bertujuan melindungi seni budaya bangsa yang majemuk.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pengesahan RUU Pornografi segera dilakukan.

4.2.3 Perbandingan Frame *Kompas* dan *Republika*, model Robert N. Entman

Perbandingan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa atau isu yang sama bisa didefinisikan dan dimaknai secara berbeda oleh media, dalam hal ini surat kabar harian *Kompas* dan *Republika*. Pendefinisian yang berbeda itu menyebabkan peristiwa atau isu bisa berubah pula. Dalam pemberitaan RUU Pornografi ini, antara harian *Kompas* dan *Republika* mempunyai definisi yang berbeda. *Kompas* memaknai berita mengenai RUU Pornografi sebagai masalah politik. Segala hal yang berkaitan dengan RUU Pornografi tidak lepas dari

aspek politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi berita yang didominasi dengan adu argumen antara para perwakilan fraksi parpol yang ada di DPR. Adu argumen ini mewarnai pembahasan RUU Pornografi. Tidak hanya itu, Kompas menganggap bahwa kontroversi yang terjadi di masyarakat adalah akibat dari peta politik di DPR yang masih terbelah terkait pembahasan RUU Pornografi, ada fraksi yang memaksakan RUU ini segera disahkan, tapi ada juga yang menghendaki ditunda. Kontroversi yang terus terjadi di masyarakat ini yang kemudian dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memunculkan konflik horizontal yang akan mengganggu keutuhan NKRI. Sebagai konsekuensi dari melihat masalah ini sebagai masalah politik, sumber berita yang diwawancarai adalah sumber berita yang berlatar belakang politik. Walaupun ada sumber yang bukan berlatar belakang politik, namun pendapatnya hanya hanya sebagai pendukung. Namun di sini Kompas pemilihan sumber berita yang lebih banyak ditonjolkan adalah dari perwakilan fraksi parpol di DPR yang menolak pengesahan RUU Pornografi, dalam hal ini FPDI-P dan FPDS. Hampir dalam setiap beritanya sumber berita didominasi oleh pandangan kedua fraksi diatas. Selain itu, penempatan berita Kompas lebih banyak menempatkan berita mengenai RUU Pornografi di rubrik politik.

Sedangkan surat kabar harian *Republika* juga memaknai peristiwa RUU Pornografi sebagai masalah politik. Dari keseluruhan berita yang ditulis wartawan *Republika* yaitu membahas tentang mekanisme politik di DPR dalam proses pengesahan RUU ini. Dari sumber yang di jadikan sumber berita berlatar belakang politik.

Mereka adalah perwakilan fraksi parpol yang ada di DPR untuk membahas pengesahan RUU Pornografi. Adu argumen dari setiap fraksi ini yang mewarnai mekanisme politik dari proses pengesahan RUU ini. Perbedaannya adalah pada pemilihan sumber berita. Sumber berita yang lebih ditonjolkan oleh Republika dalam setiap pemberitaannya terkait RUU ini adalah perwakilan dari fraksi-fraksi yang mendukung RUU Pornografi untuk segera disahkan. Dalam hal ini FGolkar, FPAN, FPKB, Fdemokrat dan sumber-sumber lain yang mendukung cara pandang mereka. Hal ini yang kemudian mempengaruhi *moral evaluation* dan *treatment recommendation* dari kedua harian antara Kompas dan Republika tersebut.

Kompas menilai adanya RUU Pornografi. RUU ini dipandang akan menimbulkan konflik horizontal seiring dengan kontroversial yang semakin meluas di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kompas berharap bahwa pengesahan RUU Pornografi sebaiknya di tunda, karena negara ini masih belum siap menerapkan UU ini ketika sudah disahkan. Berbeda *Republika* menganggap berita RUU Pornografi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan pornografi yang semakin luas di Indonesia. Perkembangan ini bisa melalui jaringan internet, telepon genggam, dan televisi. Jika hal ini dibiarkan akan membahayakan moral generasi muda bangsa. Maka, dengan RUU ini negara dapat mengantisipasi eksploitasi seksual dan kejahatan pornografi yang sering menimpa anak dan perempuan karena mempunyai hukum

yang jelas. Republika mengharapkan RUU Pornografi segera disahkan menjadi UU.

Perangkat	Kompas	Republika
<i>Frame</i>	Berita tentang RUU Pornografi dimaknai sebagai masalah politik.	Berita tentang RUU Pornografi dimaknai sebagai masalah politik.
<i>Problem Identification</i>	Masalah politik.	Masalah politik
<i>Causal Interpretation</i>	RUU Pornografi sebagai penyebab masalah.	RUU Pornografi sebagai penyebab masalah.
<i>Moral Evaluation</i>	RUU Pornografi memunculkan kontroversi di masyarakat yang semakin meluas. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	RUU Pornografi akan melindungi anak dan perempuan dari eksploitasi seksual dan kejahatan pornografi. Selain itu, RUU ini juga dimaksudkan untuk melindungi budaya bangsa dan yang terpenting adalah untuk melindungi generasi muda dari kerusakan moral.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah dan DPR mengkaji kembali isi dari RUU Pornografi, karena masih banyaknya pasal-pasal krusial yang masih belum ada titik temunya. Pengesahan RUU Pornografi ditunda.	Pemerintah dan DPR diharapkan dapat segera mengesahkan RUU Pornografi. Karena RUU ini merupakan upaya dalam melindungi generasi muda.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis *framing* berita-berita mengenai RUU Pornografi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberitaan mengenai RUU Pornografi pada harian Kompas dan Republika terdapat kesamaan sudut pandang, yakni dalam mendefinisikan masalah RUU Pornografi sebagai masalah politik. Kedua surat kabar tersebut sama-sama menonjolkan isu konflik politik yang terjadi di DPR terkait pengesahan RUU ini. Hal ini kemudian menular di masyarakat. Kontroversi di masyarakat mengenai pengesahan RUU Pornografi semakin meluas antara yang pro dan kontra RUU ini. Keduanya juga memilih sumber berita dengan sumber yang mempunyai latar belakang politik. Tapi, sumber berita yang ditonjolkan dalam setiap berita mereka berbeda. *Kompas* lebih menonjolkan sumber berita dari fraksi parpol yang menolak pengesahan RUU Pornografi daripada sumber yang pro RUU. Hampir semua berita didominasi oleh fraksi PDI-P dan fraksi PDS yang menolak RUU. Dan untuk semakin mendukung argumen dari sumber berita tersebut, *Kompas* juga memberitakan tentang aksi demonstrasi masyarakat yang menolak RUU ini.

Sedangkan harian *Republika*, sumber berita yang mendominasi pemberitaannya yaitu dari fraksi yang pro RUU Pornografi, bahkan pihak yang kontra RUU tidak diberitakan sama sekali. Untuk mendukung argumen dari sumber beritanya, *Republika* juga memberitakan aksi demo yang mendukung RUU ini.

2. Dari definisi diatas, kedua harian ini mempunyai kesamaan menempatkan RUU Pornografi sebagai penyebab masalah.
3. Pada kedua harian antara harian Kompas dan Republika juga mempunyai penilaian moral yang berbeda dari isu RUU Pornografi. *Kompas* memberikan penilaian RUU Pornografi sebagai pemicu konflik. Kontroversi yang terus terjadi di masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang wartawan harian Kompas yang berusaha untuk senantiasa peka akan nasib manusia. Sebaliknya, *Republika* menilai adanya RUU Pornografi sebagai salah satu upaya untuk melindungi generasi muda dari kerusakan moral. RUU ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita dan anak dari kejahatan seksual serta bermaksud untuk melindungi seni budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Hal ini dapat disebabkan cara pandang wartawan harian Republika yang mengesankan membawa aspirasi mayoritas jurnalis serta intelektual Islam yang liberal dan sekuler dalam mengangkat isu maupun peristiwa.

Namun, secara ideologis menginformasikan nilai-nilai Islam dan secara terbuka menyatakan sebagai media Islam.

4. Antara Kompas dan Republika menekankan penyelesaian yang berbeda mengenai isu RUU Pornografi. *Kompas* mengharapkan pemerintah tidak terburu-buru dalam pengesahan RUU Pornografi. Dengan kata lain *Kompas* merekomendasikan pengesahan RUU Pornografi ditunda, mengingat kontroversi yang semakin meluas di masyarakat. Sementara *Republika*, mengharapkan pengesahan RUU Pornografi segera dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan pornografi dan demi melindungi generasi muda bangsa dari kerusakan moral akibat pornografi.

Jadi, secara keseluruhan kedua harian antara Kompas dan Republika mempunyai cara pandang yang sama dalam mendefinisikan masalah RUU Pornografi sebagai masalah politik. Tapi, dalam hal penilaian moral dan penekanan penyelesaian kedua harian di atas mempunyai perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh, dapat terlihat bahwa masing-masing media antara Kompas maupun Republika memiliki perspektif yang berbeda dalam menggambarkan dan memaknai RUU Pornografi.

Saran Peneliti :

1. Surat kabar sebagai salah satu sarana informasi, seharusnya bisa menampilkan fakta-fakta ke dalam bentuk berita secara jujur, obyektif dan apa adanya kepada masyarakat, tanpa penambahan dan pengurangan, penonjolan atau menghilangkan fakta-fakta sehingga masyarakat dapat mengetahui kejadian sebenarnya. Surat kabar harian Republika sebaiknya lebih memperhatikan *cover both side* (keseimbangan berita tanpa memihak).
2. Kedua media antara Kompas dan Republika sebaiknya berhati-hati dalam memberitakan atau mengutip pendapat dari sumber terkait. Karena hal ini akan mempengaruhi khalayak dalam hal perspektif terhadap sebuah isu, lebih-lebih pada isu yang syarat dengan kontroversi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bungin, Burhan, 2001. **Imaji Media Massa : Konstruksi dan Makna**, Jakarta : PT. Rajafragmindoo
- Djuroto, Totok, 2002. **Manajemen Penerbitan Pers**, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Djatmika, Prija, 2004. **Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers dan Aspek-aspek hukumnya**, Malang : Bayumedia
- Effendy, Onong Uchana, 1993. **Dinamika Komunikasi**, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Eriyanto, 2001. **Analisis Wacana**, Yogyakarta : LKIS
- _____, 2002. **Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media**, Yogyakarta : LKIS
- Hamad, Ibnu, 2004. **Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik**, Jakarta : Granit
- Junaedhi, Kurniawan, 1991. **Ensiklopedi Pers Indonesia**, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi, 2001 : **Pers Indonesia Era Transisi**, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Kountur, Ronny, 2003. **Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis**, Jakarta : PPM
- Kriyantono, Rahmad, 2006. **Teknik Praktis Riset Komunikasi**, Jakarta : Kencana

Oetama, Jacob, 2001. **Pers Indonesia**, Jakarta : PT. Kompas Gramedia Group

Panuju, Redi, 2005. **Nalar Jurnalistik : Dasarnya Dasar-dasar Jurnalistik**, Malang : Bayumedia

Siahaan, Hotman. M., et al., 2001 : **Pers yang Gamang**, Yogyakarta : Galang Printika

Sobur, Alex, 2002. Analisis Teks Media : **Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing**, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sudibyo, Agus, 2001. **Politik Media dan Pertarungan Wacana**, Yogyakarta : LKIS

NON BUKU :

Internet (<http://www.republika.co.id/default.asp>) tanggal 28 Oktober 2008 pukul 20.17 wib